TENTANG AKS TENTANG

# SI, KADER dan DEMOKRASI

*

Laporan Umum PRESIDIUM
kepada Sidang ke-II D.N. SOBSI
Djakarta, 20-27 Agustus 1961

# TENTANG AKSI, KADER DAN DEMOKRASI

*

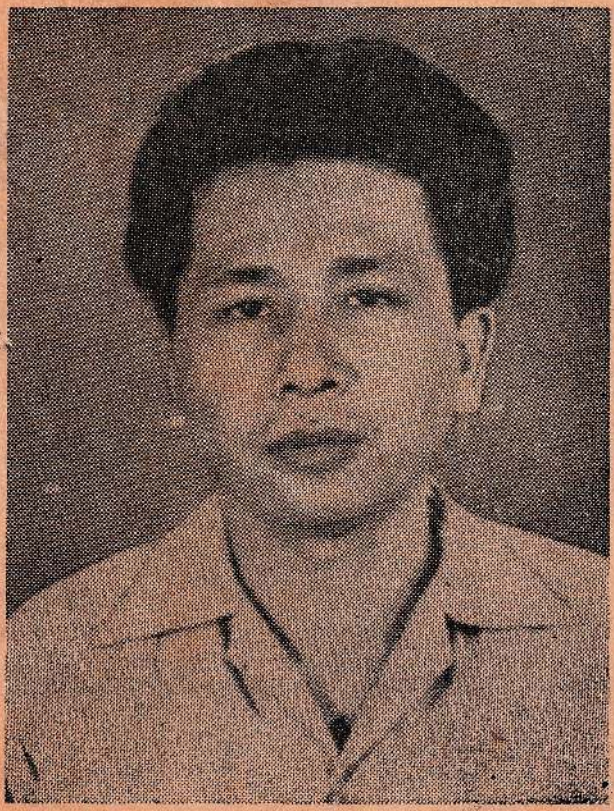
Laporan Umum
Presidium
Kepada
Sidang Kedua
Dewan Nasional
S.O.B.S.I.

*

**disampaikan oleh :**
**Njono — Ketua D.N. SOBSI**

CEK - 2001
PER. NEG. R. I.

*Diterbitkan oleh:*
*Jajasan Karya Bakti*
*Djakarta, September 1961*



Njono — Ketua D.N. SOBSI

*Laporan Umum Presidium kepada Sidang ke-II Dewan Nasional SOBSI:*

## TENTANG AKSI, KADER DAN DEMOKRASI.

Saudara$^2$ jang tertjinta,

Sidang ke-II Dewan Nasional SOBSI sekarang ini diadakan setahun sesudah Kongres Nasional ke-III SOBSI di Solo pada tanggal 22-27 Agustus 1960. Kita semua masih ingat bahwa Kongres Nasional ke-III SOBSI terkenal sebagai Kongres kaum buruh Indonesia untuk sandang-pangan dan demokrasi.

Dengan suara bulat Kongres telah mensahkan *Program Tuntutan SOBSI Untuk Sandang-Pangan Dan Demokrasi*. Untuk memenangkan program tuntutan ini Kongres telah menentukan dwitugas SOBSI, jaitu *pertama:* tugas memperkuat persatuan kaum buruh Indonesia, dan *kedua:* tugas meluaskan organisasi diseluruh negeri.

Dwitugas SOBSI ini pada pokoknja telah dilaksanakan se-giat$^2$nja dan se-baik$^2$nja oleh semua badan pimpinan SOBSI dan Serikatburuh$^2$-Anggotanja. Pelaksanaan dwitugas itu telah membikin kedudukan organisasi SOBSI lebih kuat dikalangan kaum buruh Indonesia dan didalam kehidupan politik dinegeri kita, sungguhpun masih harus ditempuh beberapa tindakan untuk mengatasi matjam$^2$ kekurangan, kesulitan, rintangan dan halangan.

Tugas memperkuat persatuan kaum buruh Indonesia dan tugas memperluas organisasi SOBSI diseluruh negeri masih harus dikerdjakan dengan lebih giat dan lebih baik lagi untuk dapat menjesuaikan keadaan organisasi dengan situasi umum dikalangan kaum buruh Indonesia dewasa

ini. Situasi umum ini jang merupakan situasi bergolak ditandai oleh *pertama*: meluasnja aksi² sosial-ekonomi jang bersifat massal dikalangan kaum buruh, dan *kedua*: meningkatnja perlawanan² kaum buruh terhadap usaha² reaksioner jang mentjoba memetjah-belah persatuan kaum buruh dan membubarkan organisasi² buruh revolusioner. Djuga situasi umum dikalangan Rakjat Indonesia menundjukkan adanja situasi bergolak, jaitu suasana kebangkitan berbagai golongan Rakjat jang makin kuat menuntut pelaksanaan Manipol setjara konsekwen dan penjelenggaraan Pola Pembangunan Nasional setjara demokratis.

Dalam waktu setahun sesudah Kongres Nasional ke-III SOBSI telah terdjadi beberapa kali gelombang pemogokan, terutama di-perusahaan² modal besar asing dan perusahaan² bekas milik Belanda jang telah diambil-alih dan telah didjadikan perusahaan² negara. Terdjadinja pemogokan² ini, selain didorong oleh tekanan² ekonomi jang bertambah berat dengan terus naiknja harga barang² sandang-pangan, adalah terutama diakibatkan oleh sikap madjikan² modal besar asing jang membandel dan oleh kebidjaksanaan Pimpinan BANAS jang sekarang mendjadi BKPN (Badan Koordinasi Perusahaan² Negara) dibidang perburuhan jang tidak sesuai dengan Manipol. Pemogokan² itu pada umumnja dilakukan setelah berbagai djalan penjelesaian dengan musjawarah dan berunding tidak mendapat perhatian selajaknja.

Untuk mempertinggi produksi di-perusahaan² negara, SOBSI berulang kali mendesak kepada Pemerintah agar melaksanakan prinsip „pimpinan patriotik, pertinggi produksi, tjegah korupsi dan sabotase, djamin demokrasi dan perbaiki nasib kaum buruh". Prinsip ini diadjukan berdasarkan pengertian umum jang masuk-akal, bahwa nasib buruh dalam djaman merdeka harus lebih baik daripada dalam djaman pendjadjahan dan nasib buruh diperusahaan² jang diambil-alih harus lebih baik daripada se-

belum diambil-alih. Pengertian umum ini adalah sesuai dengan apa jang dinjatakan oleh Presiden Sukarno dalam Manipol jang menegaskan, bahwa „..... *Kita berrevolusi, kita berdjuang, kita berkorban, kita berdansa dengan maut, toh bukan hanja untuk menaikkan bendera Sang Merah Putih, bukan hanja untuk melepaskan Sang Garuda Indonesia terbang diangkasa ?*", tetapi sebagaimana dikemukakan oleh Presiden Sukarno dalam risalah „Mentjapai Indonesia Merdeka", bahwa „*Kita bergerak karena kesengsaraan kita, kita bergerak karena ingin hidup lajak dan sempurna*".

Kepada Pemerintah, SOBSI djuga berulang kali mendesak, supaja sesuai dengan semangat gotong-rojong jang ditandaskan dalam Manipol, hendaknja dalam menjelesaikan soal² perburuhan djangan ditinggalkan musjawarah dengan Serikatburuh² jang bersangkutan. Tetapi apa jang terdjadi ? Bukannja nasib kaum buruh dibekas perusahaan² Belanda jang telah didjadikan perusahaan² negara diperbaiki, malahan hak² kaum buruh jang sudah biasa berlaku dan jang merupakan hasil² penjelesaian perselisihan perburuhan menurut saluran Undang² No. 22/1957 dikurangi, tanpa musjawarah atau mendengarkan pendapat² Serikatburuh² jang bersangkutan. Tindakan² jang merugikan kaum buruh ini adalah tindakan² Pimpinan BANAS jang pada bulan November 1959 membuat penetapan upah lembur jang lebih rendah daripada ketentuan² jang sudah berlaku, pada bulan Desember 1959 menghapuskan gratifikasi 1958-1959, pada bulan Maret 1960 memberikan Tundjangan Hari Raja 1960 jang djauh lebih rendah daripada biasanja dan membatalkan semua CAO (P.K.B.) jang merupakan hasil perdjuangan buruh selama ber-tahun² dengan banjak pengorbanan.

Hingga sekarang inpassing buruh perusahaan² negara dalam Peraturan Gadji BANAS jang ditentukan pada bulan November 1959 tidak dilaksanakan setjara kon-

sekwen, sehingga bagian terbesar buruh perusahaan$^2$ negara belum diinpas. Selain itu usaha$^2$ mengurangi hak$^2$ djaminan sosial masih terus dialami oleh kaum buruh dibeberapa perusahaan negara. Dalam pokoknja keadaan perburuhan di-perusahaan$^2$ negara, chususnja dilingkungan bekas perusahaan$^2$ Belanda jang diambil-alih, belum normal. Keadaannja mendjadi bertambah tegang dengan adanja usaha$^2$ untuk menghambat pembentukan Dewan$^2$ Perusahaan menurut Undang$^2$ No. 45/1960 dengan djalan memaksakan pembentukan PTK (Persatuan Tenaga Karjawan) jang diinstruksikan oleh Pimpinan BANAS. Pembentukan PTK ini dalam prakteknja ditudjukan untuk membubarkan atau membekukan Serikatburuh$^2$ jang sudah ada dan jang telah lama dibentuk oleh kaum buruh setjara demokratis serta telah terudji kesetiaan dan kesungguhannja dalam melawan sisa$^2$ kekuasaan kolonial Belanda dan dalam membela Republik Proklamasi.

Untuk menormalkan kembali keadaan perburuhan dilingkungan perusahaan$^2$ negara tidak ada djalan lain ketjuali melaksanakan pedoman umum jang telah diberikan oleh Presiden Sukarno dalam Amanat Kenegaraan 17 Agustus 1961 jang berdjudul RE-SO-PIM jang menegaskan agar segala persoalan diselesaikan berdasarkan Konsep Manipol dan mentjegah djangan sampai „..... *hanja mengganti madjikan$^2$ Belanda atau madjikan$^2$ asing jang lain, dengan ndoro$^2$-madjikan Indonesia ....*". Dengan tegas sekali lagi ditandaskan oleh Presiden Sukarno, untuk *„ikut-sertakan seluruh pekerdja dalam memikul tanggungdjawab dalam produksi dan alat$^2$ produksi. Djangan ndoro$^2$an ! Pengikutsertaan itu akan melantjarkan dan memperbesar produksi*".

Berdasarkan Program Tuntutan SOBSI, kegiatan$^2$ umum SOBSI dilapangan sosial-ekonomi ditudjukan untuk mentjegah kemerosotan tingkat hidup kaum buruh dengan terutama membela hak$^2$ kaum buruh jang sudah biasa berlaku, memperdjuangkan perbaikan penghasilan

bagi berbagai golongan kaum buruh dan menuntut penurunan harga barang$^2$ sandang-pangan. Bersamaan dengan itu memperdjuangkan perluasan hak$^2$ demokrasi, mengingat kenjataan, bahwa hingga sekarang gedjala$^2$ anti-demokrasi jang bangkit selama berlakunja keadaan perang masih belum reda.

Hasil$^2$ perdjuangan jang telah ditjapai adalah kenaikan upah tahun 1960 antara 10%-30% bagi kaum buruh partikelir, dikeluarkannja instruksi Menteri Perburuhan tentang pengurangan ketentuan bea-meterai jang harus digunakan dalam menjelesaikan perselisihan perburuhan dan adanja instruksi Menteri Perburuhan untuk menghindarkan pemetjatan$^2$. Selandjutnja telah berhasil dipertahankan hak$^2$ mendapatkan tundjangan hari raya untuk pegawai dan pekerdja negeri, kaum buruh perusahaan$^2$ negara dan kaum buruh partikelir. Untuk tahun 1961 djumlah tundjangan hari raya bagi kaum buruh partikelir pada umumnja lebih besar daripada tahun sebelumnja. Chusus untuk kaum buruh perusahaan$^2$ negara, terutama kaum buruh di-bekas$^2$ perusahaan$^2$ Belanda jang diambil-alih jang mengalami matjam$^2$ tindakan pengurangan atas hak$^2$ sosial-ekonominja jang sudah biasa berlaku, telah berhasil dipertahankan hak$^2$nja untuk mendapatkan tjatu tjuma$^2$ dan gratifikasi. Jang telah dibajarkan adalah gratifikasi tahun 1959, meskipun disana-sini kaum buruh mengalami kerugian$^2$ dan sekarang sedang diselesaikan pembajaran gartifikasi tahun 1960. Selain itu telah berhasil diperdjuangkan kenaikan upah untuk tahun 1961 antara 15% dan 25% bagi kaum buruh gula dan perkebunan. Bagi perusahaan$^2$ negara lainnja kenaikan upah ini lambat penjelesaiannja.

Untuk pegawai dan pekerdja negeri, ber-sama$^2$ dengan RKS-SB$^2$/SS$^2$ Pegawai Negeri telah berhasil diperdjuangkan pelaksanaan PGPN-Baru, meskipun masih harus diusahakan pembajaran rapelnja, penundaan potongan tabungan wadjib 10% dan ketentuan tentang besarnja

djumlah tundjangan kemahalan daerah. Kenaikan upah 25% bagi pekerdja negeri baru berlaku dibeberapa daerah, sedangkan mengenai hak mendapatkan distribusi beras bagi pekerdja masih belum ada ketentuan. Jang masih dalam penjelesaian adalah perbaikan distribusi beras dan barang2 sandang-pangan lainnja bagi pegawai negeri beserta keluarganja, sedang jang sudah tertjapai perbaikan adalah mengenai distribusi beras di Djakarta, jaitu 8 kg untuk pegawai dan 8 kg untuk masing2 keluarganja.

Untuk kaum buruh perusahaan2 partikelir, ketjuali di-perusahaan2 modal besar asing, pada umumnja dapat diselesaikan kenaikan upah 25% untuk tahun 1961. Jang masih merupakan persoalan besar adalah masalah anemeran dan pemetjatan2 jang terus dilakukan oleh maskapai2 minjak besar monopoli asing BPM, SVPM dan CALTEX dan di-perusahaan2 rokok B.A.T. dan FAROKA.

Mengenai perdjuangan untuk penurunan harga, baru berhasil dengan adanja peraturan Menteri Perdagangan pada achir bulan Desember 1960 tentang penurunan harga tekstil etjeran dengan 15% dan pengurangan komponen harga tekstil dan bahan2 bakunja. Tetapi pada umumnja harga tekstil masih djauh diatas daja-beli kaum buruh dan Rakjat dan keadaan harga barang2 sandang-pangan masih terus naik membubung tinggi. Dengan demikian perdjuangan untuk penurunan harga masih harus dilandjutkan. Soal harga adalah soalnja seluruh Rakjat. Karena itu ber-sama2 berbagai golongan Rakjat, SOBSI dan Serikatburuh2-Anggotanja, disamping memperdjuangkan tuntutan2 umum untuk penurunan harga, djuga berusaha sekuat tenaga supaja aksi2 penurunan harga menghasilkan keuntungan2 materiil bagi massa buruh dan Rakjat berdasarkan prinsip „ketjil-hasil".

Dalam membela dan memperkuat demokrasi, telah berhasil digagalkan usaha2 reaksioner untuk membubarkan



PER. PEG. R. I.

atau mengebiri Vaksentral² dan Serikatburuh² jang ada dan disahkannja Undang² Pokok Kepegawaian oleh DPR. Undang² Pokok Kepegawaian ini selain memuat kewadjiban², djuga mengatur hak² pegawai negeri, pembentukan Dewan Permusjawaratan Pegawai dengan ikutsertanja wakil² Vaksentral² dan Serikatburuh² pegawai negeri dan adanja peradilan pegawai.

Kegiatan² SOBSI dan semua Serikatburuh-Anggota-SOBSI sekarang dipusatkan untuk memenangkan 10-pasal tuntutan SOBSI jang diumumkan sesudah Hari Besar Kaum Buruh Sedunia, Hari 1 Mei 1961, dan untuk membebaskan ratusan kaum buruh, aktivis dan kader buruh jang ditahan selama berlakunja aksi².

10-pasal tuntutan SOBSI itu adalah tuntutan² untuk perbaikan penghasilan dan distribusi barang² sandang-pangan bagi pegawai negeri, kenaikan upah 25% dan hak mendapatkan distribusi beras bagi pekerdja negeri, kenaikan upah 25% untuk tahun 1961 bagi kaum buruh perusahaan² negara dan kaum buruh partikelir, pembajaran gratifikasi tahun 1960 dan pelaksanaan inpassing tanpa mengurangi hak² kaum buruh jang sudah ada bagi kaum buruh perusahaan² negara, pembentukan Dewan² Perusahaan menurut Undang² No. 45/1960 dan pentjabutan instruksi BANAS tentang pembentukan PTK, larangan massa-onslag dan adanja Undang² Hubungan Kerdja jang demokratis, penurunan harga beras, minjak-tanah dan barang² sandang-pangan lainnja, pengambil-alihan sisa² modal Belanda di-perusahaan² tjampuran, pengambil-alihan perusahaan² Belgia dan tuntutan² lainnja.

*Sebagian daripada 10-pasal tuntutan SOBSI itu telah berhasil diperdjuangkan. Adalah mendjadi kewadjiban SOBSI dan semua Serikatburuh²-Anggota-SOBSI untuk melandjutkan aksi² persatuan jang bersifat massal, melebar dan tahan udji guna menjelesaikan 10-pasal tuntutan SOBSI dengan mengobarkan lebih kuat semangat setia-*

*kawan dikalangan kaum buruh dan didalam kehidupan kader. Pelaksanaan aksi² persatuan ini adalah tidak terpisahkan dengan perdjuangan untuk membela dan memperkuat demokrasi serta pengorganisasian gerakan mengkonsolidasi dan memperluas organisasi SOBSI dan semua Serikatburuh-Anggota-SOBSI diseluruh negeri.*

Untuk melaksanakan tugas memperluas organisasi diseluruh negeri, kita telah mempunjai *Plan Tiga Tahun Organisasi dan Pendidikan* jang sesuai dengan keputusan Kongres Nasional Ke-III SOBSI mulai berlaku sedjak 1 Djanuari 1961. Selain itu telah dilakukan usaha² untuk menjesuaikan keadaan organisasi dengan Konstitusi SOBSI jang telah disempurnakan oleh Kongres Nasional Ke-III SOBSI, memperbaiki keuangan organisasi, mengkonsolidasi organisasi dikalangan kaum buruh transport dan kaum buruh agraria, memperluas organisasi dikalangan pekerdja betjak, kaum buruh nelajan dan kaum buruh dilapangan perdagangan, mengadakan gerakan turun-kebawah untuk membantu badan² organisasi bawahan dan memperkuat badan² pimpinan dari atas sampai kebawah, terutama dengan memetjahkan setjara tepat masalah kader sebagai tulangpunggung organisasi. Praktek² organisasi dan aksi² selama ini memperkuat apa jang dinjatakan dalam Laporan Umum Kongres, bahwa situasi umum jang kita hadapi sekarang adalah tjukup baik untuk melandjutkan perluasan anggota dan organisasi SOBSI dan Serikatburuh²-Anggota-SOBSI diseluruh negeri, asalkan kita selalu bertindak aktif dan mempunjai inisiatif jang tidak habis²nja.

*Adalah mendjadi kewadjiban SOBSI dan semua Serikatburuh-Anggota-SOBSI untuk melandjutkan pelaksanaan tugas memperluas organisasi diseluruh negeri dengan menaruh perhatian se-besar²nja kepada tenaga² pelaksananja, jaitu kader² jang merupakan milik organisasi jang paling berharga.*

Dalam Garis Perdjuangan Konstitusi SOBSI telah di-

njatakan dengan tegas, bahwa sumber pokok dari kemerosotan tingkat-hidup kaum buruh dan seluruh Rakjat-pekerdja adalah karena Indonesia belum merdeka penuh dan ekonominja masih bersifat kolonial. Karena itu telah ditentukan bahwa tugas nasional jang harus dipikul oleh SOBSI dan semua Serikatburuh-Anggotanja masih belum berubah. Tugas nasional ini adalah masih tetap memperkuat front persatuan nasional untuk menjelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus 1945 sampai ke-akar²-nja. Ini berarti melandjutkan perdjuangan untuk menghapuskan sama-sekali imperialisme dan feodalisme dinegeri kita sebagai sjarat mutlak untuk menudju kemasjarakat sosialis di Indonesia. Tugas nasional ini dalam pokoknja sekarang telah dirumuskan dalam Manipol dan perintjiannja jang oleh MPRS dalam Sidangnja jang berlangsung dari tanggal 10 November sampai dengan tanggal 7 Desember 1960 telah ditetapkan sebagai Garis² Besar Haluan Negara. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, MPRS djuga telah mensahkan Pola Pembangunan Nasional Tahapan Pertama jang oleh Presiden Sukarno telah dinjatakan berlaku sedjak tanggal 1 Djanuari 1961. SOBSI dan semua Serikatburuh-Anggotanja telah menjatakan sikapnja jang tegas mendukung Manipol dan Pola Pembangunan Nasional. Mengenai Pola Pembangunan Nasional akan diberikan laporan chusus oleh Kawan F. Runturambi, Anggota Presidium Dewan Nasional SOBSI jang djuga *mendjabat* sebagai Anggota Badan Pekerdja DEPERNAS.

Untuk pelaksanaan Manipol setjara konsekwen dan untuk berhasilnja Pola Pembangunan Nasional, sedjak berachirnja Sidang Pertama MPRS jang merupakan peristiwa politik jang besar dalam kehidupan nasional dinegeri kita, SOBSI dan semua Serikatburuh-Anggotanja mendjuruskan kegiatan² nasionalnja, selain untuk memperkuat persatuan kaum buruh dan memperluas organisasi diseluruh negeri, djuga untuk memperluas organisasi

diseluruh negeri, djuga untuk memperteguh persatuan nasional revolusioner dari semua kekuatan politik dan karja pendukung Manipol jang oleh Presiden Sukarno diberi bentuk jang chas, jaitu persatuan NASAKOM, persatuan antara golongan² politik Nasionalis, Agama dan Komunis.

Dari kegiatan² organisasi selama setahun ini, dapatlah disimpulkan, bahwa semua anggota, aktivis dan kader SOBSI dan Serikatburuh²-Anggota-SOBSI sekarang ini menghadapi *„empat-tugas-besar dan tiga-soal-penting"*. Keempat tugas besar ini adalah *pertama*: tugas memperkuat persatuan kaum buruh Indonesia, *kedua*: tugas memperluas organisasi SOBSI diseluruh negeri, *ketiga*: tugas memperteguh persatuan nasional jang berintikan NASAKOM dan *keempat*: tugas memperhebat perdjuangan Rakjat menjelesaikan tuntutan² Revolusi Agustus 1945. Sedangkan ketiga soal penting jang harus kita petjahkan adalah masalah² *aksi, kader* dan *demokrasi*.

Dengan dikemukakannja „empat-tugas-besar" tersebut, mendjadi djelaslah, bahwa dwitugas SOBSI tidak bisa dipisahkan dengan tugas² nasional jang harus dipikul oleh SOBSI dan semua Serikatburuh-Anggotanja. Oleh karena itu untuk waktu² selandjutnja kata „dwitugas" disempurnakan mendjadi „empat-tugas-besar".

Disamping menghadapi „empat-tugas-besar dan tiga-soal-penting", kita masih mempunjai satu pekerdjaan penting dibidang internasional, jaitu mensukseskan *Kongres ke-V Serikatburuh² Sedunia* pada bulan Desember 1961 di Moskow. Mengenai Kongres Buruh Sedunia ini akan diberikan laporan chusus oleh Kawan Tjugito, Wakil Ketua Dewan Nasional SOBSI, jang telah mewakili SOBSI untuk turut-serta menjusun Rentjana Program Aksi Serikatburuh² Sedunia jang akan diadjukan kepada Kongres. Kongres Serikatburuh Sedunia ini pasti akan lebih memperkokoh persatuan dan solidaritet kaum buruh disemua negeri dalam memperkuat perdjuangan

Rakjat² sedunia untuk memelihara perdamaian dunia dan menghantjurkan imperialisme dan kolonialisme, guna kemenangan² pasti bagi demokrasi, kemerdekaan nasional dan Sosialisme.

## I. MASALAH AKSI² MASSAL, MELEBAR DAN TAHAN UDJI.

Pengalaman² aksi selama ini memberikan peladjaran sekali lagi, bahwa tuntutan² kaum buruh, meskipun tjukup adil dan masuk akal, hanja dapat dimenangkan melalui perdjuangan jang disertai dengan kegigihan, keuletan dan ketjerdikan. Perdjuangan ini diperlukan mengingat kenjataan² masih belum diachirinja apa jang oleh Presiden Sukarno dinamakan „pentjoleng² disemua bidang". Hingga sekarang belum dilaksanakan pembentukan dewan² jang sesuai dengan apa jang dinjatakan dalam „Djarek" jang menegaskan, bahwa „..... disemua perusahaan² Negara, disemua PT² Negara, dibentuk dewan², jang berkewadjiban membantu pimpinan perusahaan untuk mempertinggi kwantitet dan kwalitet produksi, dan untuk mengawasi kaum pentjolengan², kaum koruptor², kaum penipu², kaum pentjuri² kekajaan negara !".

SOBSI dan semua Serikatburuh-Anggotanja merasa bertanggungdjawab untuk mentjegah ketidak-puasan kaum buruh mentjetus dalam bentuk² aksi perseorangan jang anarkis. Oleh karena itu SOBSI berkewadjiban menjalurkan dan memimpin aksi² jang timbul dikalangan kaum buruh mendjadi aksi² jang teratur. Dalam menjalurkan dan memimpin aksi² kaum buruh, SOBSI dan semua Serikatburuh-Anggotanja berpedoman kepada garis aksi jang telah ditentukan oleh Kongres Nasional ke-III SOBSI. Dengan djelas dinjatakan dalam Laporan Umum Kongres, bahwa se-baik²nja kontradiksi² jang timbul dalam rangka kerdjasama nasional diselesaikan

dengan djalan berunding. Karena itu hingga sekarang dalam menjelesaikan soal² perburuhan SOBSI dan semua Serikatburuh-Anggotanja belum pernah meninggalkan djalan penjelesaian dengan berunding, sebaliknja sering ditinggalkan tidak diadjak berunding sebagaimana terbukti dengan adanja matjam² tindakan dari Pimpinan BANAS jang mengurangi hak² djaminan sosial kaum buruh, tanpa musjawarah ataupun mendengarkan pendapat² Serikatburuh² jang bersangkutan.

Garis aksi SOBSI jang terkenal sebagai garis „seribu satu matjam aksi" adalah hasil penjimpulan Sidang Dewan Nasional ke-VI SOBSI pada bulan Desember 1958 jang kemudian diperkuat oleh Kongres Nasional ke-III SOBSI. Penjimpulan ini selengkapnja adalah sebagai berikut:

Aksi² dilakukan melalui aksi² Serikatburuh, aksi² SOBSI dan aksi² bersama antara semua Vaksentral dan Serikatburuh. Semua aksi diusahakan untuk dikombinasikan setjara baik dengan kegiatan² di Dewan² Perwakilan Rakjat, kegiatan² wakil² kaum buruh di-panitia² penjelesaian perselisihan perburuhan dan badan² perwakilan lainnja dan mengusahakan hubungan baik dengan alat² negara. Aksi² jang bersifat massal dilakukan dengan menggunakan menggunakan matjam² tjara dan bentuk jang berat-ringannja disesuaikan dengan keadaan dan keperluan tanpa meninggalkan djalan penjelesaian dengan berunding dan tidak melupakan sasaran pokok perdjuangan nasional sekarang ini, jaitu imperialisme asing dan komplotannja didalam negeri.

Penjimpulan Sidang Dewan Nasional ke-IV SOBSI ini menundjukkan, bahwa garis „scribusatu matjam aksi" mengandung beberapa prinsip pokok, jaitu:

*pertama*: prinsip massal,
*kedua* : prinsip kombinasi, dan
*ketiga* : prinsip mentjegah salah sasaran.

*Prinsip massal* menegaskan apa jang mutlak dan apa

jang tidak mutlak dalam melakukan aksi². Jang mutlak adalah sifatnja aksi² jang harus massal, sehingga merupakan aksi² massa, jaitu aksi² dari massa, oleh massa dan untuk massa. Tanpa aksi² massa, tidak akan ada kemenangan dan kemadjuan bagi massa sendiri. Sedangkan mengenai tjara² dan bentuk² aksi adalah tidak mutlak harus sama pada tiap waktu dan bagi tiap daerah atau lapangan-kerdja, tetapi bisa beraneka-warna, ber-beda² dan ber-ubah² menurut keperluan, keadaan dan perkembangan daripada aksi², termasuk reaksi² jang harus diperhitungkan. Demikian halnja dengan djalannja aksi². Adalah tidak mutlak bahwa aksi² itu hanja mengenal satu djalan, jaitu djalan madju, tanpa mengenal djalan mundur. Soal madju dan soal mundur adalah soal biasa dalam aksi², halmana ditentukan oleh situasi kongkrit pada tiap waktu. Tidak ada aksi² jang tidak ber-liku² djalannja, soal pokoknja jalah bagaimana aksi² itu berachir dengan kemenangan se-banjak²nja dan kegagalan sedikit²nja. Pengalaman² aksi tjukup membuktikan bahwa menangnja aksi² terutama ditentukan oleh sifatnja jang massal.

Kaum buruh Indonesia jang makin tinggi kesedaran politiknja makin terlatih dalam melakukan seribusatu matjam aksi. Kaum buruh tjukup memberi peladjaran kepada kita tentang kemampuan massa dalam membuat kreasi² baru, jaitu matjam² bentuk dan tjara aksi jang ditjiptakan oleh massa sendiri, setelah massa memahami garis aksi jang ada. Dalam pokoknja melalui diskusi² dan melalui praktek² aksi telah dapat diatasi anggapan² jang keliru, seperti anggapan², bahwa dengan adanja garis „seribusatu matjam aksi", maka aksi² berat tidak bisa diadakan dan bahwa jang membawa hasil hanjalah aksi² „total" atau „frontal" sadja. Djuga telah berhasil dilempangkan adanja gedjala² mau „aksi habis²an". Anggapan² jang keliru ini pada umumnja bisa timbul karena belum djelasnja garis aksi, karena didorong oleh

keinginan² subjektif atau diakibatkan oleh tjara² memimpin aksi jang tidak tepat dan tidak teratur.

*Prinsip kombinasi* menegaskan matjam² pekerdjaan jang harus dikoordinasi se-baik²nja untuk mentjapai hasil² aksi jang se-besar²nja, terutama mengkombinasi aksi² massa dengan kegiatan² menghubungi wakil² Serikatburuh jang duduk didalam lembaga² demokrasi seperti DPA, DEPERNAS, DPRGR, MPRS, Dewan² Perwakilan Rakjat di-daerah² dan badan² perwakilan lainnja.

Pekerdjaan² lainnja jang tidak dapat diabaikan adalah mengkombinasi aksi² massa dengan kegiatan² berunding. Perundingan² tidak hanja diperlukan dalam menjelesaikan tuntutan², tetapi sangat dibutuhkan dalam mengusahakan saling pengertian, menghilangkan salah paham dan menarik simpati umum dari berbagai golongan Rakjat dan berbagai kalangan pedjabat, baik sivil maupun militer. Melalui perundingan² dapat diberikan pendjelasan² se-tepat²nja mengenai adilnja tuntutan² dan duduk perkara jang sebenarnja.

Kita telah memahami adanja dua matjam kontradiksi dan dua matjam tjara penjelesaian. Jang pertama adalah kontradiksi antara kita dengan musuh jang harus diselesaikan dengan djalan perdjuangan dengan tudjuan menghantjurkan musuh. Jang kedua adalah kontradiksi dikalangan Rakjat jang harus diselesaikan dengan djalan demokratis dengan tudjuan memperkuat persatuan. Karena itu untuk mentjapai hasil jang se-besar²nja dalam memperdjuangkan kepentingan² kaum buruh dengan menarik simpati umum se-luas²nja atau menetralisasi golongan² tertentu, adalah sangat penting untuk melakukan serempak kegiatan aksi dengan kegiatan berunding. Hanja dalam menghadapi musuh² Revolusi Nasional Indonesia kita hanja mempunjai satu sikap, jaitu berdjuang untuk menghantjurkannja.

Dalam mengusahakan perundingan² kita telah mempunjai beberapa pengalaman. Dibeberapa tempat per-

nah kader² kita mempunjai rasa segan untuk berunding dengan para pedjabat, karena mempunjai anggapan jang keliru, jaitu menganggap bahwa semua pedjabat sudah mendjadi pengikut kaum reaksioner. Dalam kenjataannja tidak semua pedjabat itu reaksioner, diantara mereka ada jang tergolong kaum reaksioner, ada jang tidak tergolong kaum reaksioner, tetapi bersifat birokratis, dan ada jang demokratis. Menurut ukuran politik sekarang ada pedjabat² jang menentang Manipol, jang ragu² mendjalankan Manipol, dan jang konsekwen mendjalankan Manipol.

Pengalaman lain jalah karena sibuk membangkitkan massa, maka kader² kita kurang sungguh² mengusahakan perundingan² dengan Vaksentral², Serikatburuh² dan semua fihak jang dipandang perlu. Akibatnja jalah aksi² memang bersifat massal, tetapi tidak tjukup melebar, sehingga sulit ditjiptakan aksi² persatuan jang luas. Sebaliknja, pernah ada pengalaman, perundingan² tjukup diadakan, tetapi tanpa mempersiapkan massa kaum buruh. Akibatnja jalah kerdjasama berhasil ditjapai, tetapi lemah basisnja, jaitu tidak mempunjai dukungan massa jang luas.

Semua pengalaman aksi ini membuktikan bahwa pekerdjaan² kombinasi jang dilakukan setjara tepat membikin aksi² jang berkembang dikalangan kaum buruh tidak terpentjil dan bahkan mendapat dukungan dari berbagai golongan Rakjat. Karena itu sangat penting untuk menggunakan se-baik²nja lembaga² demokrasi jang ada dan melakukan perundingan² se-giat²nja dengan semua fihak jang dipandang perlu.

*Prinsip mentjegah salah sasaran* menegaskan adanja sikap jang harus ber-beda² dalam menghadapi matjam² sasaran aksi, jaitu fihak² jang bertanggungdjawab dan jang dituntut. Selama ini kita telah menentukan sikap jang ber-beda² dalam menghadapi kaum modal besar asing dan kaum modal nasional. Djuga kita bedakan

sikap kita dalam menghadapi kaum kapitalis-birokrat dan kaum kapitalis-partikelir nasional, demikian pula menghadapi pedjabat² negara jang reaksioner, jang birokratis dan jang demokratis. Dengan sikap jang mem-beda²kan ini maka dapat ditentukan tjara² menghadapinja setepat²nja untuk mendjamin bahwa aksi² kaum buruh tidak hanja membawa hasil² jang menguntungkan kaum buruh, tetapi djuga menguntungkan persatuan nasional.

Tugas pokok jang harus dipikul oleh kaum buruh dalam tingkatan perdjuangan nasional dan demokratis sekarang ini adalah tugas nasional. Tugas nasional ini pada pokoknja adalah tugas menjelesikan kontradiksi terpokok pada waktu sekarang, jaitu kontradiksi antara Rakjat Indonesia dengan kaum imperialis asing, seperti misalnja tugas membebaskan Irian Barat, melawan subversi dan intervensi asing, melawan usaha² jang mau memasukkan Indonesia kedalam blok militer jang agresif, melawan kapitalis monopoli asing jang masih ada dinegeri kita dan menentang investasi modal asing baru. Musuh Rakjat Indonesia jang pertama adalah masih tetap kaum imperialis Belanda, sedangkan musuh jang paling berbahaja dan paling agresif adalah masih tetap kaum imperialis Amerika Serikat. Adalah mendjadi kewadjiban kaum buruh untuk mendjadi pelopor dalam melaksanakan tugas nasional jang pokok itu. Untuk mendjamin agar kaum buruh dapat melaksanakan tugas nasional itu se-baik²nja, selajaknja bila mereka mendapatkan hak dan kemungkinan untuk menikmati perbaikan² dilapangan sandang-pangan dan demokrasi.

*Dari pendjelasan² tersebut diatas, dapat disimpulkan, bahwa intisari dari garis seribusatu matjam aksi adalah melaksanakan dengan konsekwen prinsip² massal, kombinasi dan mentjegah salah sasaran, dengan porosnja adalah membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi kaum buruh dalam aksi² massa, dengan tidak terpaku pada satu tjara dan satu bentuk aksi sadja. Prinsip² mas-*

*sal, kombinasi dan mentjegah salah sasaran merupakan prinsip² pokok jang tidak bisa di-pisah²kan satu sama lain, dan semuanja harus diperhitungkan dalam merentjanakan, mempersiapkan serta memimpin aksi².*

Dalam aksi², tahu garis aksi sadja tidaklah tjukup. Untuk melaksanakan garis itu setjara tepat, selain masih dibutuhkan pedoman² pelaksanaan dan penelitian² kembali, dalam praktek² aksi selalu timbul matjam² soal jang memerlukan pemetjahan setjara tepat pula. Memimpin aksi² tidak dapat disamakan dengan memainkan buah² tjatur jang merupakan barang² mati, tetapi berhadapan dengan massa jang hidup perasaan, fikiran dan tjita²nja serta berhadapan dengan matjam² kekuatan sosial. Kita masih harus melatih diri untuk tidak hanja memiliki garis aksi jang tepat, tetapi djuga untuk memiliki seni aksi atau kemahiran aksi jang makin tinggi.

Berdasarkan pengalaman² aksi selama ini dapat dikemukakan adanja beberapa masalah jang sering kita hadapi dalam praktek, jaitu masalah² jang bersangkut-paut dengan peranan pimpinan, peranan massa, peranan kampanje, pengorganisasian diskusi² aksi dan usaha² meninggikan semangat setia-kawan.

*Mengenai peranan pimpinan,* telah berulang kali dikemukakan bahwa lebih daripada waktu jang sudah² pada waktu sekarang ini, dimana disatu fihak massa kaum buruh ber-sama² Rakjat makin kuat menuntut perbaikan² dilapangan ekonomi dan politik dan dipihak lain gedjala² anti-demokrasi jang bangkit selama berlakunja keadaan perang belum reda, sangat dibutuhkan adanja pimpinan jang kuat bagi aksi² massa jang terus berkembang. Pimpinan jang kuat sangat diperlukan untuk mendjaga supaja semua gerakan berdjalan menurut garis² aksi jang telah ditentukan, tidak salah sasaran dan tidak terpentjil. Jang dimaksud dengan pimpinan kuat jalah pimpinan jang bertindak aktif, bersikap objektif, tahu madju, tahu mundur dan tahu batas.

Soal aksi adalah mendjadi tanggungdjawab kolektif daripada badan² jang bersangkutan, terutama dalam menetapkan garis² tuntutan, tjara² dan bentuk² aksi, dalam menganalisa perkembangan aksi, dalam memetjahkan kesulitan² aksi dan dalam mengatur pembagian pekerdjaan jang kongkrit. Kuatnja pimpinan bukan terletak dalam kuatnja orang perorangnja, tetapi adalah pertama² terletak dalam kebulatan fikiran kolektif, baik diwaktu mengalami kemenangan atau kegagalan, maupun diwaktu bergerak madju atau mundur, terutama diwaktu menghadapi kesulitan². Untuk mentjapai kebulatan fikiran diperlukan tjara-kerdja demokratis jang dipadukan dengan memegang teguh disiplin dan memelihara keakraban dalam kehidupan kader, terutama antara kader² atasan dengan bawahan.

Dalam memimpin aksi² masih sering timbul persoalan sampai dimana batas² aksi. Dalam hal ini kita telah mempunjai pegangan, jaitu setiap aksi harus menguntungkan kaum buruh, dipandang adil oleh Rakjat, tidak ber-larut², tetapi dimulai dan diachiri tepat pada waktunja. Ini berarti bahwa dalam melakukan setiap aksi kita tetap mengutamakan kepentingan front persatuan nasional, tanpa mengorbankan kepentingan kaum buruh dan tanpa melepaskan kebebasan organisasi.

Pengalaman² aksi selama ini telah membuktikan, bahwa dalam memimpin aksi² kita telah bersikap tjukup objektif, halmana terbukti dari tepatnja tuntutan² dan sembojan² aksi jang kita adjukan, luasnja dukungan massa kaum buruh dan simpati umum Rakjat dan banjaknja aksi² jang berhasil, sungguhpun masih ada kekurangan²-nja. Ini tidak berarti bahwa tidak ada gedjala² subjektif sama sekali. Gedjala² subjektif masih ada jang ditimbulkan oleh kekurangteguhan dalam melaksanakan garis massa, dan masih adanja sifat² liberal dalam mendjalankan serta mengontrol pelaksanaan keputusan² dan pe-

tundjuk² organisasi. Pada umumnja gedjala² subjektif itu dapat diatasi dengan adanja gerakan turun kebawah dan adanja diskusi² periodik. Karena itu peranan pimpinan jang pokok adalah setjara objektif merumuskan tuntutan² dan membuat petundjuk² aksi serta setjara aktif mengambil bagian dalam aksi², terutama dalam bagian² jang menentukan menang kalahnja aksi², dalam membantu badan² organisasi bawahan dan dalam mendorong madju kader² jang ragu². *Singkatnja pimpinan jang kuat adalah pimpinan jang tahu keadaan dan tahu ambil inisiatif dengan mengutamakan kenjataan² objektif dan menjampingkan keinginan² subjektif. Untuk ini semua dibutuhkan pengalaman, latihan, pendidikan self-kritik butuhkan pengalamane latihan, pendidikan self-kritik dan kritik, dan saling bantu.*

*Mengenai peranan massa,* telah mendjadi pengertian kita bahwa peranan massa adalah menentukan kemenangan aksi. Tetapi telah berulang kali kita simpulkan bahwa kita masih kurang teguh memegang garis massa. Kita pernah menjimpulkan adanja gedjala² birokratis dalam tubuh organisasi kita. Bentuknja jalah kurang memadukan pimpinan dengan massa, kurang sungguh² mendjadikan setiap soal mendjadi soalnja massa agar tidak terbatas mendjadi soalnja badan² pimpinan sadja. Dalam Laporan Umum Kongres Nasional ke-III SOBSI dinjatakan, bahwa: „..... *pada umumnja kita telah mampu menentukan garis² tuntutan, aksi dan organisasi jang sesuai dengan perasaan dan fikiran massa. Kekurangannja jalah bahwa garis² kegiatan jang tepat itu belum tjukup dibawa kembali dan diresapkan dikalangan massa untuk membangkitkan kegiatan² jang bersifat massal. Kekurangan ini menundjukkan bahwa garis pimpinan „dari massa kembali kemassa" masih harus diusahakan untuk dipegang lebih teguh dan dilaksanakan dengan lebih konsekwen. Singkatnja, tugas kita jang terpenting adalah membasiskan semua kegiatan organisasi*

*jang ada mendjadi kegiatan di-organisasi-basis² jang bersifat massal".*

Kekurangteguhan dalam memegang garis massa ini ternjata dalam batas² tertentu mentjerminkan adanja gedjala liberal jang berbentuk sikap „hangat² tai-ajam" dalam mengurus nasib kaum buruh jang bertambah berat beban penghidupannja. Selain itu djuga mentjerminkan dalam batas² tertentu kekaburan pengertian bahwa pengokohan persatuan buruh dan perluasan organisasi buruh revolusioner diseluruh negeri hanja dapat diwudjudkan melalui perdjuangan.

Tanpa perdjuangan tidak ada persatuan buruh dan perluasan organisasi buruh revolusioner. Persatuan dan perluasan organisasi hanja bisa ditjapai dengan djalan membangkitkan, mengorganisasi dan memobilisasi aksi² kaum buruh melawan kegiatan² reaksioner kaum imperialis asing dan komplotannja didalam negeri jang bertudjuan memetjah-belah kaum buruh, meratjuni fikiran kaum buruh dan membubarkan organisasi² kaum buruh jang revolusioner. Djuga kaum kapitalis nasional jang oleh kaum buruh harus diadjak bersatu dalam front persatuan nasional, terbawa oleh kedudukan klasnja sebagai kapitalis, tidak suka melihat kaum buruh bersatu padu dan mempunjai organisasi buruh revolusioner jang kuat. Laporan Umum Kongres Nasional ke-III SOBSI telah menjatakan, bahwa: „..... *Pengalaman² perdjangan se-hari² memberikan peladjaran kepada kaum buruh, bahwa kaum buruh hanja akan dihargai dan dihormati sebagai soko-guru masjarakat adil dan makmur, djika kaum buruh bersatu dan terorganisasi dengan lebih baik dan lebih kuat, serta mendjadikan dirinja sebagai motornja perdjuangan Rakjat Indonesia dalam mengubah keadaan² jang tidak baik mendjadi keadaan² jang baik bagi Rakjat, Republik dan Revolusi Indonesia".*

Kebangkitan aksi² kaum buruh dalam menjambut 10-pasal tuntutan SOBSI menandakan bahwa gedjala² libe-

ral dan kekaburan pengertian mengenai hubungan antara persatuan dan perdjuangan telah tampak terkikis. Aksi² kaum buruh tjukup melebar ke-daerah² dan keberbagai lapangan kerdja dan karena sifatnja jang massal, maka dalam waktu jang tidak lama telah tertjapai hasil² jang besar. Aksi² dikombinasi dengan baik dengan kegiatan² menghubungi wakil² kaum buruh di DPR dan dengan kegiatan² berunding dengan berbagai tokoh² Partai dan tokoh² nasional lainnja untuk mendapatkan saling pengertian dan dukungan. Peranan kampanje ternjata sangat membantu dalam mendjelaskan tuntutan² jang sangat adil dan lajak. Hal lain jang menondjol jalah peranan kaum buruh wanita dalam aksi² menuntut penurunan harga diberbagai daerah jang menundjukkan berhasilnja Seminar Nasional Buruh Wanita jang diselenggarakan oleh Sentral Biro SOBSI pada permulaan bulan Mei 1961 di Djakarta dalam mengkonsolidasi kegiatan² kaum buruh wanita jang terus berkembang madju.

Dari aksi² jang terdjadi selama ini dapatlah disimpulkan, bahwa kaum buruh makin tinggi kesedaran politiknja. Makin tingginja kesedaran politik kaum buruh djuga terbukti dalam aksi², kaum buruh melawan pembentukan PTK setjara paksaan dan dalam aksi² menuntut pembebasan kaum buruh, aktivis² dan kader² SOBSI dan Serikatburuh-Anggotanja jang ditahan atau diadili. Menurut tjatatan jang ada pada waktu berlangsungnja Sidang ke-II Dewan Nasional SOBSI djumlah jang ditahan ± 900 orang, sebagian besar di Sumatera Utara. Halmana telah didemonstrasikan dalam aksi² mogok kaum buruh gula Pandji dan Asembagus (Djawa Timur) pada achir bulan Djuni dan permulaan bulan Djuli 1961 untuk membela 1.000 kaum buruh kampanje dan beberapa aktivis Serikatburuh jang dipetjat dan dalam aksi ambil-alih perusahaan rokok Belgia „FAROKA" di Malang pada tanggal 4 Djuli 1961 sebagai tanda setia-kawan terhadap perdjuangan kemerdekaan nasional Rakjat



PERP. NEG. R. I.

Kongo. Aksi² ambil-alih perusahaan Belgia sebelumnja itu telah dilakukan oleh kaum buruh perkebunan di Sumatera Utara pada bulan Maret 1961.

Semua kenjataan ini menundjukkan kemampuan kaum buruh Indonesia dalam menundjukkan rol peloporn̄ja untuk mengubah keadaan² jang tidak baik jang masih diderita oleh Rakjat Indonesia. Dalam mengubah keadaan² jang tidak baik ini adalah tepat sekali pedoman jang dinjatakan oleh Presiden Sukarno dalam Manipol, bahwa *„tidak ada satu perubahan besar didalam riwajat-dunia jang achir² ini, jang lahirnja tidak karena massa-actie"*.

Untuk melandjutkan membasiskan semua kegiatan organisasi mendjadi kegiatan diorganisasi-basis² jang bersifat massal, perlu diteruskan dengan lebih baik pengkonsolidasian klompok² dan organisasi-basis² perluasan anggota dan organisasi, pelaksanaan pendidikan massal bagi aktivis² organisasi-basis², pendaftaran dan peningkatan kesedaran politik dan organisasi dari aktivis² baru jang timbul selama aksi², termasuk aktivis² buruh wanita, pembentukan grup² propagandis dan perbaikan kampanje aksi.

Poros dari semua kegiatan ini adalah tetap membangkitkan massa kaum buruh. Sebagaimana kita ketahui bersama, kaum buruh Indonesia terdiri dari beberapa golongan, jaitu pegawai dan pekerdja negeri, kaum buruh perusahaan² negara dan kaum buruh perusahaan² partikelir, di-perusahaan² modal besar asing, di-perusahaan² partikelir nasional dan di-perusahaan² ketjil lainnja. Disamping mempunjai tuntutan² ekonomi dan politik jang sama, masing² golongan kaum buruh mempunjai tuntutan sosial-ekonomi dan sasaran² aksi jang ber-beda², demikian pula keadaan dan perkembangan organisasinja adalah tidak sama. *Karena itu tjarakerdja membangkitkan massa adalah tidak mutlak harus sama bagi tiap² lapangan kerdja dan dalam hal ini sangat penting untuk*

*aktif mengenal keadaan kongkrit lapangan kerdja dan watak² chusus tiap² golongan buruh untuk menghindarkan tjarakerdja jang subjektif.*

Untuk membangkitkan massa kaum buruh telah tersedia sendjata²nja, jaitu Program Tuntutan SOBSI Untuk Sandang-Pangan dan Demokrasi dan Ketetapan² MPRS jang telah memutuskan Manipol sebagai garis² besar haluan negara dan mensahkan Pola Pembangunan Nasional Semesta Tahapan Pertama jang harus dilaksanakan oleh Pemerintah dan semua pendukung Manipol. Soalnja sekarang jalah bagaimana menuangkan semuanja itu dalam sembojan² aksi jang mempunjai daja mobilisasi massa jang luas. Kita telah tjukup mempunjai pengalaman, bahwa sembojan² aksi jang tepat dan singkat dapat dengan tjepat membangkitkan dukungan² jang luas terhadap tuntutan² aksi, tidak hanja dari massa kaum buruh, djuga dari golongan² Rakjat lainnja. Sembojan² aksi itu penting peranannja tidak hanja pada waktu berlangsungnja aksi², tetapi djuga penting pada waktu mempersiapkan dan melandjutkan aksi². Peladjaran lain jalah sungguhpun tuntutan² pokoknja belum berubah, sembojan² aksi itu bisa ber-ubah² sesuai dengan perubahan² jang terdjadi dalam perkembangan aksi².

Mengenai *peranan kampanje,* garis kampanje kita jalah *massal, mudah* dan *murah.* Peranan kampanje adalah penting artinja pada saat seperti sekarang, dimana masih berlaku matjam² kekangan² terhadap hak² demokrasi, dimana madjalah sentral SOBSI „BENDERA BURUH" serta madjalah² dan buletin² Pimpinan² Daerah SOBSI dan Pimpinan² Pusat Serikatburuh belum dapat idjin terbit dan dimana harga kertas dan ongkos pertjetakan terus naik.

Tugas pokok kampanje adalah mempopulerkan tuntutan² jang adil dan lajak dikalangan kaum buruh dan golongan² Rakjat lainnja, menjampaikan dengan tjepat perkembangan aksi² dan hasil²nja kepada massa, mena-

rik simpati umum dan menelandjangi kampanje² reaksioner. Kampanje akan berhasil baik, djika massa sendiri dapat ditarik mengambil bagian jang aktif dalam melakukan kampanje aksi. Kita telah mengenal ber-matjam² kreasi massa dalam mentjiptakan berbagai bentuk kampanje jang populer, misalnja plakat² jang dibikin dari koran² lama, tas-tas kaum buruh wanita jang ditempeli dengan kertas² jang berisi tuntutan², tulisan² dengan tjat di-tjaping² jang dilakukan oleh para pekerdja negeri, berbagai bentuk kampanje jang diutjapkan atau dinjanjikan berupa parikan², pantun², kidung² dan sebagainja, diantaranja jang pada waktu belakangan terkenal dikalangan kaum buruh Djawa Timur adalah parikan sebagai berikut:

*Ngétung lintang tjik akèhé,*
*Njawang mbulan tanggal selawé,*
*Ngétung utang tjik akèhé,*
*Nompo bajaran karèk amplopé.*

Dalam bahasa Indonesia:

*Menghitung bintang begitu banjaknja,*
*Memandang bulan tanggal dua puluh lima,*
*Menghitung hutang begitu banjaknja,*
*Menerima bajaran tinggal amplopnja.*

Dalam meluaskan kampanje aksi sangat besar bantuan dari para seniman dan sasterawan Rakjat, karena itu perlu lebih dipererat kerdjasama SOBSI dan Serikatburuh²-Anggotanja dengan LEKRA dan organisasi² kesenian lainnja. Dilapangan kegiatan kebora djangan dilupakan luasnja pengaruh kesenian² tradisionil daripada Rakjat, seperti ketoprak, dagelan dan wajang kulit di Djawa Tengah, ludruk di Djawa Timur, reog dok-dok di Djawa Barat, pantun² jang dinjanjikan di-daerah² luar

Djawa, tjerpen², sadjak², lukisan² dan sebagainja. Karena itu perlu dipetjahkan bagaimana mendorong kaum buruh untuk mendjadi pekerdja² seni-amatir dan dengan demikian mereka akan mendjadi propagandis² dari massa jang mengkampanjekan tuntutan² massa sendiri. Selain itu kegiatan olah-raga perlu djuga mendapat perhatian dan pemetjahan, misalnja dalam menjelenggarakan pertandingan² persahabatan sesudah mentjapai kemenangan² dalam aksi².

Usaha² kampanje lainnja jalah mengorganisasi grup² propagandis jang terutama terdiri dari aktivis² jang aktif dalam aksi² dan menggunakan se-baik²nja publikasi² melalui pers dan radio serta melalui siaran² organisasi.

Tugas kampanje kongkrit pada waktu sekarang adalah bagaimana memassalkan sembojan² umum SOBSI tentang empat tugas besar SOBSI dan sembojan² organisasi dalam memetjahkan tiga soal penting, jaitu aksi, kader dan demokrasi. Tugas kongkrit lainnja jalah mengorganisasi diskusi² aksi dikalangan kaum buruh, aktivis² dan kader² serta memupuk dan meninggikan semangat setia-kawan berdasarkan prinsip „satu ditjubit, semua merasa sakit".

*Dengan singkat dapat ditegaskan bahwa garis kampanje kita adalah menjatakan semua tuntutan kita dalam bahasa massa dengan tjara jang mudah dimengerti massa, sehingga massa tidak hanja mengerti, tetapi djuga berbuat melakukan kegiatan kampanje.*

Maksud daripada pengorganisasian diskusi² aksi dikalangan kaum buruh jalah mendorong kaum buruh lebih berani dan lebih banjak bitjara mengenai tuntutan²nja, aksi²nja dan pengalaman²nja sendiri sehingga kesedaran politik dan kesedaran organisasi mereka dapat lebih dipertinggi. Diskusi² massa ini terutama dilakukan melalui klompok² diorganisasi-basis dan di-saat² waktu luang.

Diskusi² aksi dikalangan aktivis² dan kader² diadakan terutama untuk berdasarkan praktek² aksi jang ada meng-

usahakan kesatuan pendapat dan pengertian tentang garis aksi dan organisasi dalam situasi sekarang, mengikis setiap gedjala liberalisme dan subjektivisme serta memperkokoh disiplin dalam memimpin aksi² jang bersifat massal dan lebih tepat mengurus kontradiksi² dalam rangka kerdjasama nasional. Diskusi² aksi diadakan melalui diskusi² periodik, gerakan² beladjar dan pendidikan² kader.

Berhasilnja aksi² tidak hanja ditentukan oleh garis aksinja jang benar dan pelaksanaannja jang tepat, djuga ditentukan oleh kemampuan organisasi, terutama badan² pimpinannja. Laporan Umum Kongres Nasional ke-III SOBSI dengan djelas menjimpulkan, bahwa usaha² melebarkan aksi² persatuan tidak boleh dipisahkan dari usaha² memperbaiki organisasi, ke-dua²nja harus dilakukan serempak. Soal aksi dan organisasi adalah satu, satu sama lain tidak bisa di-pisah²kan. Aksi² jang berhasil baik membawa kemadjuan organisasi jang pesat, sebaliknja dengan organisasi jang lebih baik aksi² dapat dikembangkan dengan lebih sempurna lagi.

Aksi² memenangkan 10-pasal tuntutan SOBSI tidak hanja memperdjelas siapa kawan dan siapa lawan, tetapi djuga telah membangkitkan kegairahan kader² SOBSI dan Serikatburuh²-Anggota-SOBSI untuk mensukseskan aksi² dan memperbaiki organisasi. Kegairahan kader² merupakan faktor pertama jang menentukan lantjarnja aksi² jang bersifat massal. Karena itu masalah garis aksi jang benar serta pelaksanaannja jang tepat tidak bisa dipisahkan dengan masalah politik kader jang benar serta pelaksanaannja jang tepat. Memisahkan soal aksi dengan soal kader adalah sama dengan melepaskan „kapal dilautan tanpa djurumudi".

Dari semua keterangan diatas dapatlah disimpulkan, bahwa dengan diatasinja anggapan² jang keliru terhadap garis „seribusatu matjam aksi" dan dengan lebih dipahaminja peranan pimpinan, peranan massa, peranan

kampanje, pentingnja diskusi² aksi dan usaha² meninggikan semangat setiakawan dalam aksi², serta dilaksanakannja setjara tepat politik kader jang benar, aksi² kaum buruh dapat bersifat massal, melebar dan meningkat setjara wadjar dengan mentjapai hasil² jang se-besar²nja.

*Aksi² jang berhasil baik adalah aksi² jang berachir dengan menangnja tuntutan² jang adil dan lajak, bertambah kuat dan besarnja organisasi, bertambah teguh dan luasnja persatuan buruh, makin terpentjilnja anasir² reaksioner jang anti-buruh dan anti-demokrasi, dan makin tingginja kesedaran politik kaum buruh jang bertugas memelopori perdjuangan Rakjat Indonesia dalam melenjapkan sisa² kekuasaan kolonial Belanda dan melawan intervensi imperialis disegala bidang jang dikepalai oleh imperialis Amerika Serikat, untuk mentjapai Indonesia jang merdeka penuh dan demokratis.*

## II. MASALAH KADER TULANGPUNGGUNG ORGANISASI.

Laporan Umum Kongres Nasional ke-III SOBSI telah menjimpulkan, bahwa masalah badan² pimpinan dalam pokoknja adalah masalah kader. Karena itu, dalam hubungan antara kader² perlu ada sikap jang tepat. Untuk lebih memahami masalah kader oleh Badan Penerbit Dewan Nasional SOBSI pada bulan Februari 1961 telah dibrosurkan tulisan Kawan Mohamad Munir, Wakil Ketua Dewan Nasional SOBSI, tentang „Kader Tulangpunggung Organisasi". Dalam brosur ini dinjatakan bahwa kader adalah tulangpunggung organisasi jang peranannja sebagai pemimpin dan penghubung dengan massa kaum buruh sangat menentukan dalam hal madju atau mundurnja organisasi. Djuga dikemukakan dalam brosur tersebut bahwa sebagai tulangpunggng organisasi, kader² SOBSI dan Serikatburuh²-Anggotanja pada umumnja berwatak tidak mementingkan diri sendiri dan

bekerdja siang-malam dengan tidak memperdulikan teriknja matahari dan turunnja hudjan. Selandjutnja disimpulkan: „..... *dalam tubuh organisasi kita sekarang terdapat 2 matjam persoalan besar jang perlu mendapatkan penjelesaian se-baik²nja. Pertama: massa jang makin luas berdiri disekeliling SOBSI minta dipimpin dengan se-baik²nja, sedangkan tenaga kader SOBSI tidak tjukup. Djadi persoalannja jalah bagaimana memperbanjak kader. Dan kedua: pada umumnja kontradiksi² jang terdapat selama ini adalah karena organisasi kita masih didjangkiti oleh penjakit liberalisme dan belum tjukup tepatnja politik kader*".

Oleh Sentral Biro SOBSI telah diorganisasi gerakan mempeladjari brosur kawan Mohamad Munir tersebut jang sangat penting artinja bagi kemadjuan organisasi SOBSI dan seluruh Serikatburuh-Anggotanja. Dari gerakan beladjar ini dapat disimpulkan, bahwa pada umumnja badan² pimpinan SOBSI dan Serikatburuh²-Anggotanja dapat menerima garis² jang tepat dalam menilai, mempekerdjakan dan memelihara kader. Persoalan pokoknja sekarang jalah bagaimana garis² jang tepat itu dilaksanakan setjara tepat pula.

Menjelesaikan soal kader bukanlah soal jang sederhana dan tidak dapat dilakukan hanja setjara formil. Kita telah tjukup mempunjai pengalaman, bahwa disamping harus dipegang teguh garis² organisasi jang telah ditentukan, dalam menjelesaikan soal kader sangat diperlukan kebidjaksanaan dan kesabaran revolusioner dengan memperhatikan perasaan² dan fikiran² kader, kebiasaan² dan kesulitan²nja serta seluk-beluk penghidupan dan perdjuangannja. Kebidjaksanaan dan kesabaran revolusioner ini lebih² diperlukan mengingat kader² Serikatburuh adalah disamping ber-beda² kesedaran politiknja, ber-matjam² lingkungan pekerdjaannja, berrupa² sukubangsa dan adat-istiadatnja, djuga ada jang bekerdja sepenuhnja diorganisasi dan ada jang merang-

kap bekerdja di-lembaga$^2$ demokrasi, djawatan$^2$ atau perusahaan$^2$. Pedoman kita jalah melaksanakan apa jang dinjatakan dalam Laporan Umum Kongres Nasional ke-III SOBSI, jaitu mendorong madju semua kader untuk mendjadi kader$^2$ Serikatburuh jang tjakap dan revolusioner, senantiasa mendjaga kesatuan dan kebulatan tekad, tepat pada waktunja mengetahui dan memetjahkan kontradiksi$^2$ jang ada di-masing$^2$ tubuh organisasi dan tetap bersatu diwaktu suka dan duka. *Singkatnja segala prasangka jang tidak bersandarkan atas kenjataan$^2$ objektif harus dihindarkan.*

Persatuan dan solidaritet antara seluruh kader SOBSI dan Serikatburuh$^2$-Anggotanja dalam pokoknja sudah terudji keteguhannja sepandjang sedjarah perdjuangan SOBSI. Persatuan dan solidaritet ini telah merupakan kekuatan organisasi jang tak terpatahkan, apalagi pada saat$^2$ sekarang, dimana kader$^2$ digairahkan oleh gelombang revolusioner didalam dan diluar negeri, dimana langkah$^2$nja dituntun oleh satu garis politik, organisasi dan aksi jang benar, dan dimana fikirannja senantiasa disatukan melalui pendidikan$^2$ kader dan gerakan$^2$ membetulkan fikiran atau menambah pengetahuan revolusioner. Mengenai kontradiksi$^2$ pada umumnja telah berhasil ditjapai pengetahuan dan pengertian tentang hukum$^2$ pokoknja dan telah dipahami tjara pokok untuk menjelesaikan kontradiksi$^2$ jang timbul dalam kehidupan organisasi, jaitu melalui kritik dan selfkritik dengan semangat memperkuat persatuan jang sudah ada. Mengenai kritik dan selfkritik perlu diingatkan kembali kepada pedoman kita selama ini, jaitu supaja kritik dan selfkritik, baik jang menjangkut badan$^2$ kolektif ataupun perseorangan, dilakukan berdasarkan atas pertanggungan-djawab pekerdjaan masing$^2$ dan ditudjukan untuk perbaikan pekerdjaan dan pembulatan fikiran.

Kenjataan bahwa persatuan dan solidaritet antara kader$^2$ SOBSI dan Serikatburuh$^2$-Anggotanja-SOBSI telah

mempunjai basis² sedjarah, politik, teori dan organisasi jang kuat perlu dikemukakan mengingat masih adanja kader² jang mendjadi pendek-fikiran atau mendjadi kurang sabar hatinja menghadapi kontradiksi² dalam beberapa badan² pimpinan organisasi jang belum tjukup baik diselesaikan. Kesumpekan fikiran dan kekurangan-sabaran ini, djika diteliti, bersumber kepada keinginan² dan tjara² jang subjektif dalam menjelesaikan persoalan.

Keinginan² dan tjara² subjektif ini pada umumnja tertjermin dalam keinginan², supaja „sekali diskusi, semua soal selesai" atau mengukur segala sesuatu hanja menurut „badju sendiri". Laporan Umum Kongres Nasional ke-III SOBSI telah memperingatkan, bahwa masalah kader adalah masalah manusia biasa jang merah darahnja dan nasi makanannja, jang tidak hanja kenal lapar, tapi djuga kenal lupa dan salah. Singkatnja, masalah kader banjak menjangkut-paut masalah „penghidupan" dan masalah „pembetulan fikiran". Kita semua telah mempunjai tjukup pengalaman, bahwa masalah „penghidupan" dan masalah „pembetulan fikiran" merupakan masalah² jang tidak bisa diselesaikan dalam satu kali diskusi. Karena itu *gerakan mempeladjari masalah kader sangat perlu untuk dilandjutkan jang ditudjukan per-tama² untuk membulatkan pengetahuan dan pengertian tentang politik kader jang tepat dan seterusnja untuk meneliti serta mengikis gedjala² liberal dan subjektif dalam kehidupan kader. Gerakan beladjar ini hendaknja disertai dengan usaha² jang lebih terpimpin dalam memperbaiki keuangan organisasi, meringankan beban² penghidupan kader dan mengobarkan semangat setia-kawan dan saling bantu.*

Dalam mengorganisasi gerakan beladjar hendaknja dilakukan prinsip *„atasan memberi tjontoh kepada bawahan"*. Ini berarti, bahwa badan² pimpinan atasan disamping membuat instruksi² dan petundjuk² kerdja, djuga badan² kolektifnja sendiri melakukan diskusi² jang

terutama dipusatkan pada persoalan²: adakah garis² pimpinannja jang subjektif, adakah gedjala² liberal dalam kalangannja sendiri, sudah sampai dimanakah masalah penghidupan kader dipetjahkan setjara terpimpin, dan sudah sampai dimana dilakukan gerakan turun kebawah untuk membantu badan² organisasi dan kader² bawahan. Selain itu, perlu disediakan waktu untuk ikutserta setjara langsung dalam diskusi² di-badan² pimpinan bawahan dengan bersikap banjak mendengar dan membantu supaja kader² bawahan berani berfikir, berani bitjara dan berani berbuat. Sikap rendah hati harus tetap kita djundjung tinggi, jang berarti senantiasa bersedia beladjar dari badan² organisasi bawahan dan tidak mudah „main tjap" dan melemparkan „tjelaan² kebawah".

Mengenai betapa perlunja kader² atasan ikut-serta dalam diskusi² beladjar di-badan² pimpinan bawahan, selajaknja kita perhatikan tjletukan² kader jang mengharapkan, supaja dalam segala kesibukannja, kader² atasan tidak hanja datang se-mata² dengan „membawa instruksi dan pekerdjaan" sadja tetapi djuga berusaha menjempatkan diri untuk „omong² biasa" dengan kader² jang dipimpinnja. Adalah baik sekali didjadikan kebiasaan bagi kader² atasan untuk mentjari waktu guna setjara langsung „berbitjara dari hati kehati" dengan kader² jang dipimpinnja sebagai salah satu tjara, selain untuk mengakrabkan hubungan, djuga sekaligus untuk menjelami lebih dalam isi hati dan fikiran kader.

Prinsip „atasan memberi tjontoh kepada bawahan" sudah barang tentu tidak hanja didjalankan dalam hal beladjar, tetapi djuga dilakukan dalam bidang kehidupan organisasi lainnja terutama dalam menaati ketentuan² organisasi jang telah ditetapkan dalam Konstitusi SOBSI dalam memperkuat persatuan dan disiplin organisasi, dalam menghidupkan demokrasi dalam Serikatburuh, dalam merapatkan hubungan diantara organisasi dengan massa, dalam membantu badan² organisasi

dan kader² bawahan dan dalam mengobarkan semangat setia-kawan dalam kehidupan kader berdasarkan pengertian tidak terbatasnja bantuan moril dan terbatasnja bantuan materiil jang dapat diberikan oleh organisasi. Dalam pokoknja kebiasaan burdjuis jang hanja menekankan disiplin kebawah dan tidak mengenakan disiplin pada atasan tidak boleh terdjadi dalam kehidupan kader kita. Dengan menekankan „prinsip atasan memberi tjontoh kepada bawahan" tidak berarti diabaikannja usaha² untuk membimbing dan mendidik bawahan agar bersikap tepat terhadap atasan. Singkatnja dalam djangka waktu pandjang, setindak demi setindak, melalui pendidikan, latihan dan pengalaman kita berusaha memiliki kader² pimpinan jang dapat mendjiwai massa dan kader² jang dipimpinnja untuk bersikap, berbuat dan berdjuang guna segala apa jang baik bagi kaum buruh dan Rakjat pekerdja lainnja.

Mengenai usaha² memperbanjak djumlah kader, kita telah mempunjai Plan 3 Tahun untuk menambah djumlah tenaga² penuh bagi tiap² badan pimpinan dan dalam melaksanakannja kita telah mempunjai program kerdja, jaitu mengadakan pendidikan jang masal bagi aktivis² diorganisasi-basis², mentjatat dan mendidik kaum buruh jang aktif dan tampil dalam aksi², meningkatkan aktivis² buruh wanita dan lain²nja. Berdasarkan pengalaman² organisasi selama ini djalan jang paling baik untuk menambah djumlah kader adalah memelihara, memberi tata-sibuk, mendidik dan meningkatkan aktivis² jang lahir dalam aksi².

Disamping memperbanjak kader, usaha² lain jang perlu dipetjahkan setjara teratur adalah usaha² pendidikan guna menambah pengetahuan dan keahlian Serikatburuh, baik mengenai soal² perburuhan atau kepegawaian maupun mengenai soal² organisasi, kampanje dan aksi, berdasarkan prinsip mendjadikan kader² jang ada sebagai kader² jang „tjakap dan revolusioner".

Kebangkitan aksi² kaum buruh jang bersifat massal telah mendorong kader² SOBSI dan Serikatburuh²-Anggota-SOBSI lebih bersatu dan lebih erat hubungannja dengan massa. Puluhan kader jang telah terudji kesetiaannja dalam membela kepentingan kaum buruh, Rakjat dan Republik Indonesia telah mendjadi korban dari tindakan² anti-demokrasi dengan meringkuk dalam tahanan² atau rumah² pendjara. Pembelaan² massal jang telah dilakukan oleh kaum buruh sendiri membuktikan betapa dalamnja ketjintaan massa kepada organisasi dan pemimpin²nja. Ketjintaan massa ini bersumber kepada kesetiaan dan keteguhan kader² SOBSI dan Serikatburuh²-Anggota-SOBSI dalam membela kepentingan massa. Karena itu, dalam menghadapi tindakan² anti-demokrasi, prinsip „membela kepentingan massa" harus tetap kita pegang teguh, jang berarti kita tetap mengurus tuntutan² kaum buruh, terutama tuntutan² sosial-ekonomi. Dalam pokoknja kita tetap bekerdja melaksanakan sembojan „berdjalan dengan dua kaki", jaitu mengkombinasi pekerdjaan ber-kobar² dengan pekerdjaan tekun dan mengkombinasi pekerdjaan besar dengan pekerdjaan praktis se-hari². Semua pekerdjaan ini akan berhasil baik, djika dalam keadaan jang bagaimanapun sulitnja kita tetap mendjundjung tinggi prinsip² pimpinan kolektif. Dalam hal ini kader² jang bertanggungdjawab memimpin badan² kolektif bertugas untuk senantiasa berusaha memperbaiki peranan kepemimpinannja dengan aktif mengambil inisiatif, membuka pintu bagi tiap kritik dan mengikuti langsung praktek² organisasi, terutama bagian² pekerdjaan jang menentukan. Semangat saling bantu dalam tiap² badan kolektif perlu lebih disempurnakan dengan djalan pimpinan² tiap² badan kolektif memberikan kesempatan se-baik²nja kepada semua anggota badan kolektif jang dipimpinnja untuk menjatakan pendapat² mereka dan mengurus selajaknja pendapat² jang diadjukan. Singkatnja tidak tjukup hanja „main beri garis". Tiap² garis

organisasi jang telah ditentukan memang harus dipegang teguh, tetapi untuk pelaksanaannja setjara tepat, sangat diperlukan pendapat² massa. Sebaliknja tiap² anggota badan kolektif bertugas memberikan bantuan se-besar²nja kepada pimpinannja masing² untuk dapat melaksanakan peranan kepemimpinannja se-baik²nja.

Kuntji daripada kokohnja persatuan kader terletak jang per-tama² pada kebulatan sikap dan tekad badan² pimpinan atasan. Disinilah letak pentingnja pelaksanaan setjara konsekwen prinsip „atasan memberi tjontoh kepada bawahan". Karena itu gerakan mengikis gedjala² liberal dan subjektif dalam menjelesaikan soal kader harus dimulai gelombangnja dari atas dan kemudian meluapkannja kebawah.

Dengan makin dikikisnja penjakit² liberalisme dan subjektifisme, makin tepatnja sikap kader² atasan dalam menilai, membimbing dan memelihara kader² jang dipimpinnja dan dengan dipadukannja aksi² massa dengan usaha² mendidik dan memperbanjak kader, dapatlah dipastikan, bahwa persatuan dan solidaritet antara seluruh kader SOBSI dan Serikatburuh²-Anggota-SOBSI akan mendjadi lebih kokoh, hal mana akan sangat besar artinja bagi kemadjuan dan kemenangan perdjuangan kaum buruh dan seluruh Rakjat Indonesia.

*Pada hakekatnja masalah persatuan kader adalah masalah persatuan fikiran. Untuk mentjapai kesatuan fikiran jang benar dan objektif tidak mungkin hanja dilakukan dalam waktu sehari semalam. Karena itu dalam memetjahkan masalah kader sebagai tulangpunggung organisasi kita harus berdjuang untuk senantiasa dapat bertindak sabar dan revolusioner serta teguh dan bidjaksana.*

## III. MASALAH DEMOKRASI.

Mengenai hak² demokrasi, jang terutama diperdjuangkan oleh SOBSI dan semua Serikatburuh-Anggotanja

adalah supaja hak² kebebasan berkumpul, berorganisasi dan menjatakan pendapat setjara lisan atau tulisan diberikan se-luas²nja kepada Rakjat, sebaliknja dilakukan pembatasan atau pentjabutan hak² tersebut bagi musuh² Rakjat dan Republik Indonesia. Hingga sekarang hak² demokrasi itu belum dapat dinikmati sepenuhnja oleh Rakjat.

Selama waktu setahun sedjak Kongres Nasional ke-III SOBSI, kaum buruh masih terus mengalami matjam² tindakan anti-demokrasi. Sudah lebih setahun lamanja madjalah-Sentral SOBSI „Bendera Buruh" serta madjalah² dan buletin² Pimpinan² Daerah SOBSI dan Pimpinan² Pusat Serikatburuh belum dapat idjin terbit kembali. Pembatasan rapat², larangan² mogok dan demonstrasi masih berlaku hingga sekarang dan pada waktu belakangan ini dilakukan pembatasan² terhadap pengiriman² delegasi² kaum buruh dan golongan² Rakjat lainnja ke-negeri² sosialis. Prosesperbal² dan penahanan² tidak hanja didjalankan terhadap aktivis² dan kader² SOBSI dan Serikatburuh²-Anggota-SOBSI, djuga dilakukan terhadap kaum buruh biasa jang melakukan aksi² untuk perbaikan nasib, penurunan harga dan ambil-alih perusahaan² imperialis seperti ambil-alih perusahaan² Belgia sebagai tanda solidaritet kaum buruh Indonesia dalam menjokong perdjuangan kemerdekaan nasional Rakjat Kongo.

Perajaan Hari Besar Kemenangan Kaum Buruh Sedunia, Hari 1 Mei, dikekang dengan matjam³ larangan, diantaranja larangan² mengibarkan Bendera Merah dan menjanjikan lagu kaum buruh sedunia „Internasionale". Larangan² ini adalah untuk pertama kalinja dialami oleh kaum buruh Indonesia selama Republik Indonesia berdiri dan terdjadi djustru pada waktu MPRS telah mensahkan Manipol sebagai Garis² Besar Haluan Negara jang antara lain mengakui setjara resmi bahwa kaum buruh

dan kaum tani adalah „soko-guru masjarakat adil dan makmur di Indonesia".

Usaha$^2$ reaksioner untuk memetjah-belah persatuan buruh, mentjoba mengisolasi SOBSI dan membentuk OPPI setjara paksaan masih diteruskan. Dan untuk menghambat pembentukan Dewan$^2$ Perusahaan dengan ikut-sertanja wakil$^2$ Serikatburuh berdasarkan Undang$^2$ No. 45/1960 telah dipaksakan dengan matjam$^2$ tindakan kekerasan jang melanggar hak$^2$ azasi warganegara pembentukan PTK (Persatuan Tenaga Karjawan) di-perusahaan$^2$ negara.

Matjam$^2$ pembatasan$^2$ dan pengekangan$^2$ terhadap hak$^2$ Serikatburuh dan hak$^2$ demokrasi ini menundjukkan bahwa gedjala$^2$ anti-demokrasi jang bangkit selama berlakunja keadaan perang masih belum reda. Laporan Umum Kongres Nasional ke-III SOBSI telah memperingatkan bahwa selama masih ada kekuasaan imperialis dibumi Indonesia, selama itu kaum buruh bersama Rakjat masih terus diantjam oleh bahaja kemerosotan tingkat hidup, bahaja anti-demokrasi dan bahaja intervensi imperialis. Djadi sumber daripada gedjala$^2$ anti-demokrasi adalah belum bersihnja negeri kita dari kekuasaan imperialisme dan komplotannja kaum reaksioner, baik jang lama maupun jang baru.

Tudjuan daripada matjam$^2$ kegiatan anti-demokrasi selama ini adalah djelas, jaitu menggagalkan persatuan NASAKOM, melemahkan kekuatan persatuan kaum buruh dan kekuatan$^2$ progresif serta menghambat meluasnja gerakan revolusioner daripada Rakjat dalam menggempur imperialisme dan feodalisme. Bangkitnja gedjala$^2$ anti-demokrasi merupakan satu segi reaksioner jang tidak dapat diremehkan dalam kehidupan politik dinegeri kita. Tetapi masih ada segi lainnja jaitu segi revolusioner jang harus diperhitungkan dan dipupuk.

Segi revolusioner ini adalah terus berkembangnja kekuatan$^2$ demokrasi disegala lapangan, tidak hanja ter-

batas dikalangan kaum buruh dan kaum tani, djuga dikalangan golongan² Rakjat lainnja.

Usaha kaum buruh ber-sama² Rakjat. Dalam membela dan memperkuat demokrasi, telah berhasil mentjapai kemadjuan² politik. Hak² politik Rakjat untuk melalui wakil²nja dalam lembaga² demokrasi seperti DPRGR, DPA, DEPERNAS dan MPRS turut-serta menentukan dan mengontrol djalannja pemerintahan dapat dipertahankan. Penghimpunan semua kekuatan revolusioner oleh Presiden Sukarno dengan bentuk jang chas, jaitu persatuan NASAKOM, persatuan antara golongan² politik Nasionalis, Agama dan Komunis, telah dilaksanakan tidak hanja dalam menjusun anggota² dan pimpinan² DEPERNAS, DPRGR dan MPRS, tetapi djuga telah dilakukan dalam membentuk pimpinan² Front Nasional dari pusat sampai ke-daerah². Jang masih matjet pelaksanaannja adalah dalam membentuk DPRDGR di-daerah² berdasarkan PENPRES No. 5/1960 jang telah disempurnakan.

SOBSI dan semua Serikatburuh²-Anggotanja sekarang sedang memperdjuangkan se-giat²nja supaja politik persatuan NASAKOM dilaksanakan dalam membentuk Dewan² Perusahaan dan dalam menjusun organisasi persatuan kaum buruh Indonesia. Menurut konsepsi SOBSI organisasi persatuan buruh itu hendaknja disusun setjara demokratis dan berbentuk Konfederasi antara Vaksentral² dan Serikatburuh² pendukung Manipol dalam kata dan perbuatan.

Pada waktu belakangan ini disamping ada orang² jang mengusulkan supaja NASAKOM diganti dengan NASASOS (Nasionalis, Agama dan Sosialis) atau NASAMAR (Nasionalis, Agama dan Marxis), ada usaha² dari kalangan IPKI untuk mengganti NASAKOM dengan POLKAR (politik dan karja), halmana tidak sesuai dengan apa jang dinjatakan dalam „DJAREK" jang oleh MPRS telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan

Manipol. Dalam „DJAREK" telah ditegaskan bahwa NASAKOM adalah konsekwensi politik jang terpenting bagi semua pendukung Manipol. Dalam tjeramahnja dimuka para pedjabat sivil dan militer, pemimpin² partai dan para mahasiswa di Medan pada tanggal 30 Djuli 1960, Presiden Sukarno telah menjatakan, bahwa fikiran² untuk mempersatukan ketiga golongan dalam masjarakat Indonesia jalah Nasionalis, Agama dan Komunis timbul sedjak tahun 1926, dan bahwa tidak mungkin POLKAR tanpa mempersatukan NASAKOM, karena NASAKOM meliputi djuga golongan politik dan karja.

Hak politik Rakjat untuk berorganisasi dalam Partai² djuga dapat dipertahankan, malahan mentjapai kemenangan jang besar dengan dibubarkannja partai² politik dan organisasi² reaksioner seperti Masjumi, PSI, Liga Demokrasi dan lain²nja, disamping itu berdasarkan PENPRES No. 7/1959 telah diputuskan Partai² mana jang dianggap sah dan berhak hidup.

Usaha² untuk membubarkan Vaksentral² dan Serikatburuh² mengalami kegagalan dan perlawanan² kaum buruh menolak pembentukan OPPI dan PTK setjara paksaan makin meluas. Kegagalan fikiran reaksioner untuk melarang semua pegawai negeri memasuki organisasi² politik pada waktu RUU Pokok Kepegawaian dibitjarakan dalam DPRGR dan penolakan sebagian besar anggota² DPRGR dan para wartawan terhadap RUU Pers jang tidak mendjamin kebebasan pers, semuanja ini membuktikan terus berkembangnja kekuatan² demokrasi disegala lapangan. Oleh Presiden Sukarno dalam musjawarah DPA pada tanggal 25 Djuli 1961 telah diumumkan suatu tradisi baru, jaitu bahwa semua rentjana Undang² jang penting, sebelum diadjukan ke DPRGR terlebih dulu akan dimintakan pertimbangan² DPA. Begitu pula segala sesuatu jang amat penting bagi negara dan bangsa akan diadjukan kepada pimpinan MPRS, sedang-

kan perundingan² jang menjangkut soal pembangunan akan diadjukan kepada Badan Pekerdja DEPERNAS. DPRGR sendiri telah memperbaiki tjara kerdjanja dalam mendengarkan suara Rakjat, jaitu dengan adanja ketentuan dapat mengundang wakil² pusat² organisasi² Rakjat jang bersngkuatan dalam membitjarakan suatu RUU jang sangat penting.

Pada waktu sekarang sedang dibitjarakan RUU tentang pemilihan umum untuk pembentukan MPR dan DPR. Dalam hal ini pendirian SOBSI jalah supaja pemilihan umum itu betul² diselenggarakan dalam waktu jang telah didjandjikan oleh Pemerintah, jaitu pada tahun 1962 jang akan datang. Undang² Pemilihan Umum jang baru hendaknja sesuai dengan Ketetapan MPRS jang menentukan adanja Undang² Pemilihan Umum baru jang mengandung prinsip pemilihan umum setjara umum, langsung, bebas dan rahasia.

Dari semua kenjataan ini dapatlah disimpulkan bahwa pada pokoknja situasi politik didalam negeri kita tetap menguntungkan kekuatan² demokratis jang pro-Manipol dan memusingkan otak kaum reaksioner jang anti-Manipol. Tetapi kita harus tetap ingat, bahwa kaum reaksioner dan kaum imperialis tetap memutar otaknja untuk mentjari matjam² akal busuk. Karena itu kewaspadaan politik dikalangan kaum buruh masih harus dipertinggi dan perdjuangan membela dan memperkuat demokrasi ber-sama² seluruh Rakjat masih harus dilandjutkan. Tugas² kongkrit SOBSI dan semua Serikatburuh-Anggotanja adalah memperkuat persatuan NASAKOM disegala bidang berdasarkan prinsip „mentjapai persatuan melalui perdjuangan" dan memegang teguh prinsip „membela kepentingan massa". Lembaga² demokrasi jang ada hendaknja didorong supaja lebih banjak lagi membitjarakan soal² jang sangat mendesak bagi Rakjat pada waktu sekarang jaitu soal sandang-pangan dan demokrasi.

Dengan pertimbangan untuk melantjarkan program

Pemerintah dibidang sandang-pangan pada tanggal 18 Djuli 1961 telah dikeluarkan Peraturan PEPERTI No. 14/1961 tentang pentjegahan kegiatan$^2$ jang dapat mengganggu atau menghambat kelantjaran perusahaan$^2$ negara atau swasta jang menjelenggarakan program Pemerintah dibidang sandang-pangan, disertai antjaman hukuman kurungan se-lama$^2$nja sembilan bulan atau denda se-tinggi$^2$nja dua puluh ribu rupiah.

Peraturan PEPERTI ini dikeluarkan pada saat$^2$ kaum buruh, pegawai dan pekerdja negeri diberbagai lapangan-kerdja sedang memperdjuangkan se-giat$^2$nja kenaikan upah, pembajaran rapel, pembajaran gratifikasi, pentjegahan pemetjatan dan penurunan harga. Aksi$^2$ kaum buruh ini bersifat aksi$^2$ sosial-ekonomi dan tudjuannja adalah untuk mentjegah kemerosotan tingkat-hidup berhubung dengan terus naiknja harga barang$^2$ sandang-pangan dan bertambah buruknja keadaan ekonomi. Karena itu djika berbitjara soal sandang-pangan bagi Rakjat, maka kaum buruhlah jang termasuk golongan$^2$ Rakjat jang paling membutuhkan kelantjaran usaha$^2$ perbaikan sandang-pangan. Tjukup banjak kenjataan$^2$ ekonomi jang membuktikan, bahwa gangguan$^2$ terhadap kelantjaran program Pemerintah dibidang ekonomi bukan datangnja dari kaum buruh, tetapi dari mereka jang menjalahgunakan wewenang$^2$ djabatan untuk memperkaja diri jang oleh Presiden Sukarno dinamakan dalam Manipol sebagai „pentjoleng$^2$ negara". Dengan pertimbangan ini SOBSI dapat menjetudjui adanja tindakan$^2$ tegas terhadap kegiatan$^2$ jang mengganggu atau menghambat pelaksanaan program Pemerintah dibidang sandang-pangan, asalkan tindakan$^2$ tegas itu dilakukan dengan tidak salah alamat. Selama ini telah tjukup bukti$^2$, bahwa dalam pelaksanaan apa jang dinamakan „penerbitan ekonomi" jang mendjadi sasaran pertama adalah Rakjat-ketjil, jaitu kaum buruh, kaum tani miskin, pedagang$^2$ ketjil, disamping itu kaum pengusaha nasional. Sebalik-

nja kaum koruptor dan kaum kapitalis birokrat jang berkomplot dengan kaum modal besar asing dan tuantanah² jang melakukan matjam² spekulasi dan manipulasi dan ber-lomba² membuat kontrak² ekonomi diluar negeri untuk kepentingan golongannja masing² tidak diganggugugat. Dalam pokoknja Rakjat menuntut keadilan. Hal ini perlu dikemukakan berhubung dalam pendjelasan Peraturan PEPERTI No. 14/1961 dinjatakan, bahwa pemogokan² digolongkan kepada gangguan² ekonomi jang harus ditjegah. Dalam Laporan Umum Kongres Nasional ke-III SOBSI telah ditegaskan sikap SOBSI jang tidak dapat membenarkan larangan² mogok di-perusahaan² jang selama berlakunja keadaan perang dinjatakan vital, apalagi djika diingat, bahwa dalam perusahaan² vital itu termasuk djuga perusahaan² modal besar asing. Selain larangan mogok itu melanggar langsung hak azasi kaum buruh, djuga bukan merupakan djalan keluar untuk mengamankan dan melantjarkan djalannja djawatan², perusahaan² dan badan² lainnja jang dinjatakan vital. Djalan jang seharusnja ditempuh oleh Pemerintah jalah menghidupkan prinsip musjawarah dan melakukan kerdjasama dengan Serikatburuh² jang bersifat saling membantu dalam membasmi anasir² subversif asing jang melakukan sabotase² ekonomi. Djalan keluar lainnja adalah melarang tindakan² madjikan² dan pedjabat² Pemerintah melakukan hal² jang merugikan kaum buruh seperti melakukan pemetjatatan² dan pengurangan² hak² djaminan sosial.

Soal hak² demokrasi adalah soalnja seluruh Rakjat jang telah diperdjuangkan sedjak djaman pendjadjahan Hindia Belanda dan selama pendudukan fasis Djepang serta hak² itu pernah dinikmati sepenuhnja pada waktu berkobarnja Revolusi Agustus 1945. Hak² demokrasi daripada Rakjat mulai ditjopoti sedjak Pemerintah Hatta dan Pemerintah Belanda pada achir tahun 1949 membuat perdjandjian KMB jang chianat itu. Hingga seka-

rang hak² demokrasi bagi Rakjat bukannja makin terdjamin. Pembatasan² terhadap hak² Rakjat untuk berkumpul, berorganisasi dan menjatakan pendapat setjara lisan dan tulisan makin terasa selama negara dinjatakan dalam keadaan perang. Karena itu SOBSI berpendapat, bahwa berlakunja Undang² Keadaan Bahaja harus ditindjau.

Dengan berpedoman kepada Manipol jang menjatakan, bahwa „demokrasi harus mendjadi alat Rakjat, alat Rakjat untuk mentjapai tudjuan Rakjat", Kongres Nasional ke-III SOBSI telah mengambil keputusan menuntut kepada Pemerintah, supaja ketentuan² jang bersifat pengekangan atau pembatasan terhadap hak² kebebasan demokratis bagi buruh dan Rakjat dan pernjataan berlakunja UUKB bagi daerah² jang tidak lagi memerlukan adanja kekuasaan istimewa, segera ditjabut. Karena itu SOBSI menjambut baik keputusan Presiden Sukarno selaku Penguasa Perang Tertinggi tentang Perubahan Tingkatan Keadaan Bahaja disebagian daerah dari tingkat keadaan perang mendjadi darurat militer atau darurat sipil mulai tanggal 31-12-1960, bahkan pentjabutan keadaan bahaja sama sekali didaerah Bali dan Kalimantan Tengah sedjak 1 April 1961.

SOBSI berpendapat bahwa penurunan tingkatan atau pentjabutan keadaan bahaja itu dapat diluaskan ke-daerah² lain jang ternjata tidak memerlukan lagi kekuasaan istimewa, sesuai dengan djiwa pernjataan P.J.M. Presiden Sukarno dalam Re-So-Pim jang mengatakan: „..... ....., *maka „keadaan perang" jang pada tanggal 14 Maret 1957 dinjatakan untuk seluruh wilajah Republik sewaktu menghadapi pemberontakan, tidak perlu lagi dipertahankan dalam keseluruhannja.*" Tindakan² penurunan tingkatan keadaan bahaja hendaknja disertai dengan tindakan² jang membawa perbaikan² dalam kehidupan demokrasi daripada Rakjat. Dan sesuai dengan djandji Pemerintah untuk memulihkan keadaan keaman-

an dan melangsungkan pemilihan umum pada tahun 1962, SOBSI mendesak kepada Pemerintah supaja berlakunja UUKB selambatnja achir tahun 1962 djangan diperpandjang lagi.

Hasrat Rakjat jang makin kuat menuntut perbaikan$^2$ dilapangan politik dan ekonomi jang djelas tertjermin dalam meluasnja aksi$^2$ jang bersifat massal daripada kaum buruh, kaum tani dan golongan$^2$ Rakjat lainnja jang menuntut sandang-pangan dan demokrasi, terus berkembangnja kekuatan$^2$ demokratis disegala lapangan, dan dengan terus meningkatnja perdjuangan Rakjat menentang imperialisme dan kolonialisme didalam dan diluar negeri, semua kenjataan$^2$ ini adalah mendjadi pertanda$^2$ jang djelas, bahwa pergulatan antara kekuatan$^2$ demokratis dan kekuatan$^2$ reaksioner, pasti berachir dengan kemenangan ditangan Rakjat. *Tugas kaum buruh adalah tampil kedepan untuk mempertjepat datangnja kemenangan Rakjat itu. makin tjepat main baik. Disinilah letak pentingnja bagi semua kader$^2$ SOBSI dan Serikat-buruh$^2$-Anggota-SOBSI untuk terus melatih diri dalam memegang teguh garis aksi jang benar dan dalam memiliki seni aksi jang makin tinggi. Djalannja perdjuangan Rakjat Indonesia jang makin pelik dan tidak sedikit duri dan randjaunja tidak hanja menuntut adanja keberanian dan kegigihan, djuga adanja keuletan dan kepandaian dalam berdjuang. Singkatnja, kita harus terus melangkah madju dengan makin tangkas melaksanakan garis seribu satu matjam aksi jang bersifat massal, melebar dan tahan udji.*

Saudara$^2$ sekalian,

Telah kita simpulkan bahwa kita sekarang memikul *„empat-tugas-besar dan tiga-soal-penting"*. Didorong oleh tjita$^2$ revolusioner jang senantiasa mendjiwai perdjuangan kita bersama, kita tidak mempunjai tekad lain ketjuali menjelesaikan semua tugas dan semua soal itu sebaik$^2$nja. Dan kita sudah kenal djalan mana jang harus

kita tempuh. Djalan ini adalah djalan persatuan, persatuan dikalangan kader dan persatuan dikalangan massa.

Ber-sama$^2$ seluruh Rakjat Indonesia, kaum buruh akan terus melangkah madju, menggerowoti dan kemudian menumbangkan sama sekali tiang$^2$ imperialisme dan feodalisme jang sudah lapuk dan masih bertjokol dibumi negeri kita. Kehantjuran tiang$^2$ penghalang ini tidak dapat dihindarkan lagi, karena hanja segolongan ketjil kaum reaksioner jang mentjoba menahannja, sedangkan Rakjat Indonesia makin kuat menuntut sandang-pangan, demokrasi dan persatuan seluruh kekuatan nasional untuk Indonesia jang merdeka penuh, bebas dari semua kekuasaan imperialisme dan feodalisme, sebagai djembatan emas kearah pembangunan masjarakat sosialis dinegeri kita. Dengan kejakinan revolusioner ini, SOBSI dan semua Serikatburuh-Anggota-SOBSI berkewadjiban menjelesaikan „empat-tugas-besar dan tiga-soal-penting" segiat$^2$nja dan se-baik$^2$nja. *Basiskan semua kegiatan organisasi kita mendjadi kegiatan kaum buruh sendiri diberbagai tempat-kerdja !*

## SEPATAH DUA-PATAH KATA MENUTUP DISKUSI UMUM TENTANG AKSI, KADER DAN DEMOKRASI.

Saudara$^2$ jang tertjinta,

Diskusi kita mengenai Laporan Umum Presidium tentang Aksi, Kader dan Demokrasi telah berachir dengan sangat baik. Dengan suara bulat kita setudjui bersama Laporan Umum Presidium jang telah menggelorakan hati kita.

Kita telah membulatkan tekad kita untuk memegang teguh „prinsip membela kepentingan massa" dan untuk terus melatih diri mempertinggi seni-aksi. Kebulatan tekad kita ini adalah kebulatan tekad daripada Anggota$^2$ Dewan Nasional SOBSI jang bertanggungdjawab mengemudikan organisasi kita diseluruh negeri. Karena itu kebulatan tekad kita besar sekali artinja bagi kemadjuan organisasi SOBSI dan bagi perkembangan seluruh gerakan buruh di Indonesia. Kita bertambah jakin, bahwa SOBSI akan terus bertambah kuat kedudukan organisasinja, sekalipun kita masih harus mengatasi matjam$^2$ kekurangan, kesulitan, rintangan dan halangan.

Dalam diskusi kita bersama, timbul beberapa masalah jang membutuhkan pemikiran lebih landjut.

1. *Garis lama atau garis baru ?*

Adalah benar pendapat beberapa kawan, bahwa garis „seribu satu matjam aksi" mengandung soal$^2$ lama dan soal$^2$ baru. Bahwa aksi$^2$ itu harus merupakan aksi$^2$ massa dan kena pada sasarannja, prinsip

umum ini sudah lama kita kenal. Garis „seribu satu matjam aksi" mengandung prinsip umum itu. Tetapi menganggap garis-aksi itu biasa sadja, adalah sikap jang tidak tepat. Sikap itu adalah menganggap „enteng" persoalan jang dalam kenjataannja tidak gampang penjelesaiannja. Garis-aksi kita sekarang adalah realisasi setjara fleksibel daripada prinsip umum itu dalam situasi politik tertentu, jaitu situasi politik jang kita alami sedjak berlakunja keadaan perang. Situasi politik ini menimbulkan soal² baru jang harus diselesaikan dengan ketjakapan² baru. Dilihat dari sudut ini, maka garis „seribu satu matjam aksi" merupakan inisiatif baru jang menundjukkan bahwa dalam keadaan jang bagaimanapun sulitnja kita tetap pegang teguh kebebasan aksi membela kepentingan² kaum buruh. Karena itu dalam membahas garis „seribu satu matjam aksi" setepatnja ditekankan pada seginja jang praktis, jaitu bagaimana kita kembangkan inisiatif baru itu untuk mempertinggi seni-aksi kita, seni-aksi jang bersumber kepada kesedaran dan kemahiran massa.

2. *Soal „ndjlimet".*

Kita pernah mempunjai satu pengalaman, jaitu karena terlalu „ndjlimet" maka djalannja aksi² tidak lantjar. Arti kata „ndjlimet" adalah terlalu banjak membuat perhitungan jang di-tjari². Kita harus djaga supaja kita tidak „ndjlimet" tetapi ini tidak berarti bahwa kita main „bras-bres" sadja dengan meninggalkan perhitungan² jang diperlukan.

Jang per-tama² kita perhitungkan adalah apa jang dinjatakan dalam Laporan Umum Presidium, supaja aksi² berachir dengan kemenangan se-banjak²nja dan kegagalan se-sedikit²nja. Pedoman umum kita jalah memimpin aksi² mendjadi aksi² jang gigih, ulet, tjer-



PER. MEG. R. I.

dik dan menang. Memperdjuangkan menangnja aksi² adalah penting sekali sebab aksi² jang gagal bisa menimbulkan ke-ragu²an dan keruwetan² didalam barisan sendiri dan dikalangan sekutu² kita.

Dalam memenangkan aksi² perlu diperhitungkan, supaja aksi² itu membawa keuntungan² materiil bagi massa dan bersamaan dengan itu djuga sekaligus memberikan pendidikan politik kepada mereka. Tanpa „keuntungan materiil" dan „pendidikan politik" aksi² jang bersifat massal tidak akan melebar dan tahan udji serta sulit untuk mengkonsolidasi keadaan organisasi.

Perhitungan lain jang sekedjappun tidak boleh kita tinggalkan, terutama oleh badan² pimpinan atasan adalah perhitungan² politik. Kita semua telah faham, bahwa politik adalah tetap mendjadi panglimanja aksi². Kongkritnja jang terutama harus diperhitungkan adalah perkembangan situasi politik umum, keadaan majoritet massa dan sekutu² kita.

Dari keterangan² ini dapatlah disimpulkan, bahwa dalam memimpin aksi² kita tetap memegang teguh sembojan: „Hati panas, kepala dingin" dengan memperhitungkan se-baik²nja segala soal jang mendjadi „ekornja aksi²".

3. *Ekses² aksi.*

Beberapa kawan mengadjukan pengalaman²nja tentang terdjadinja ekses² pada waktu berlangsungnja aksi² jang bersifat massal. Ekses² adalah gedjala² jang tidak atau kurang baik. Karena itu, sikap kita jang tepat adalah tidak membiarkan, melainkan setjara aktif menghindarkannja, meskipun ekses² itu baru merupakan ekses² jang ketjil².

Telah kita pahami bersama, bahwa kita tidak hanja berdjuang untuk kepentingan² djangka-pendek, jaitu

kepentingan$^2$ massa se-hari$^2$. Kita djuga berdjuang untuk kepentingan$^2$ djangka-pandjang, jaitu kepentingan$^2$ umum untuk menjelesaikan tuntutan$^2$ Revolusi Agustus '45 sampai ke-akar$^2$nja. Kepentingan$^2$ umum ini berputar sekitar usaha$^2$ besar untuk mengembangkan kekuatan$^2$ progresif, memperteguh persatuan nasional revolusioner dan menghantjurkan musuh$^2$ Rakjat satu per satu. Karena itu ekses$^2$ jang bisa merugikan kepentingan$^2$ djangka-pandjang harus ditjegah se-minimum$^2$nja. Ini berarti, bahwa kita tidak seharusnja mengekor kepada kesubjektifan-massa, tetapi harus mendidik massa untuk bersikap tepat terhadap kawan dan lawan serta mengenal kepentingan$^2$nja jang bersifat djangka-pendek dan djangka-pandjang. Untuk mentjegah ekses$^2$, kita tidak hanja harus mendidik massa, tetapi kita djuga harus mendidik diri kita sendiri untuk setjara kolektif bersama$^2$ mendjaga supaja garis-pimpinan kita tidak „oleng kekiri" diwaktu massa telah bangkit dan diwaktu aksi menang, serta tidak „oleng kekanan" diwaktu massa belum bangkit dan diwaktu aksi kalah. Singkatnja, kita harus mendidik massa dan mendidik diri kita sendiri untuk berbuat jang benar dan membetulkan jang salah.

Demikianlah Saudara$^2$ beberapa masalah jang patut mendjadi bahan$^2$ pemikiran kita bersama dalam melaksanakan „empat-tugas-besar" dan memetjahkan „tiga-soal-penting".

Saudara$^2$ sekalian,

Kita telah simpulkan bersama bahwa kedudukan organisasi kita bertambah kuat dan bahwa situasi politik didalam negeri kita tetap menguntungkan kekuatan$^2$ demokratis jang pro-Manipol. Tetapi djuga kita simpulkan,

bahwa kaum imperialis asing dan komplotannja kaum reaksioner jang lama dan jang baru tetap memutar otaknja untuk membuat akal² busuk baru. Untuk menggagalkan semua akal busuk ini, Laporan Umum Presidium telah menundjukkan djalan keluarnja, jaitu kita harus membela dengan teguh kepentingan massa, memperkuat persatuan NASAKOM disemua bidang dan mendorong semua lembaga demokrasi untuk lebih banjak lagi membitjarakan soal sandang-pangan dan demokrasi.

Dengan mantap telah kita setudjui bersama Laporan Umum Presidium tentang „Aksi, Kader dan Demokrasi". Apa jang kemudian harus kita perbuat ? Kita semua telah tahu djawabnja, jaitu melaksanakan Laporan Umum Presidium se-baik²nja. Dalam melaksanakan Laporan Umum Presidium ini marilah kita laksanakan prinsip jang telah kita putuskan bersama, jaitu prinsip „atasan memberi tjontoh kepada bawahan". Dengan melaksanakan tjara-kerdja ini, kami jakin bahwa SOBSI dan semua Serikatburuh-Anggotanja akan terus bergerak dengan tahu madju, tahu mundur dan tahu batas, singkatnja tidak henti²nja selalu ambil inisiatif dalam keadaan jang bagaimanapun.

**Pendjelasan tersebut diatas disampaikan oleh Saudara Njono dalam Sidang ke-II Dewan Nasional SOBSI pada tanggal 26 Agustus 1961.**

---

PER. NEG. R. I.

5715-b

DATE DUE

KEPK N o 999/58.-

5715-b

T
331.88
Njo
T.

Harga Rp. 7,50

Ps. 680 - 61